

**DAMPAK KREDIBILITAS KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP
INFLASI DI INDONESIA**

NELLA DAMAYANTI HUTAURUK

8105120482



**Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta**

PENDIDIKAN EKONOMI

PENDIDIKAN EKONOMI KOPERASI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2016

THE IMPACT OF FISCAL POLICY CREDIBILITY ON INFLATION IN INDONESIA

NELLA DAMAYANTI HUTAURUK

8105120482



**This Skripsi is written As One Of The Requirements For Obtaining a Bachelor of
Education at the Faculty of Economics, State University of Jakarta**

EDUCATION OF ECONOMICS

EDUCATION OF COOPERATIVE ECONOMICS

FACULTY OF ECONOMICS

STATE UNIVERSITY OF JAKARTA

2016

ABSTRAK

Nella Damayanti Hutaaruk. *Dampak Kredibilitas Kebijakan Fiskal terhadap Inflasi di Indonesia*. Pendidikan Ekonomi Koperasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak dari kredibilitas kebijakan fiskal terhadap inflasi di Indonesia. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data dalam kuartal dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan yang mencakup periode 2001(1) sampai 2013(4). Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda sederhana dengan menggunakan aplikasi *eviews 8*, data menunjukkan bahwa hasil kredibilitas kebijakan fiskal dalam aturan defisit tidak signifikan sebesar 0.73 dengan koefisien negatif sebesar -0.24 dan menunjukkan bahwa kredibilitas dalam aturan defisit masih kurang kredibel dalam keadaan inflasi. Sementara untuk kredibilitas aturan utang signifikan sebesar 0.003 dengan koefisien negatif sebesar -0.31 dan menunjukkan bahwa kredibilitas aturan utang memiliki kredibilitas yang baik serta mampu menurunkan inflasi. Kemudian untuk hasil diskresioner tidak signifikan sebesar 0.59 dengan koefisien negatif sebesar -0.004 dan menjelaskan inflasi. Kemudian untuk variabel openness yang dilihat dari sektor riil yaitu ekspor dan impor signifikan sebesar 0.01 dengan koefisien positif sebesar 0.07 dan dapat berdampak pada inflasi. Jadi dapat dikatakan bahwa kebijakan fiskal yang kredibel terhadap inflasi terbukti secara statistik lebih cepat mencapai keseimbangan daripada kebijakan fiskal yang tidak kredibel.

Kata Kunci : *Kredibilitas Aturan Defisit, Kredibilitas Aturan Utang, Diskresi, Keterbukaan Ekonomi, Inflasi*

ABSTRACT

Nella Damayanti Hutauruk. *The Impact of Fiscal Policy Credibility on Inflation in Indonesia*. Cooperative Economics Education, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2016.

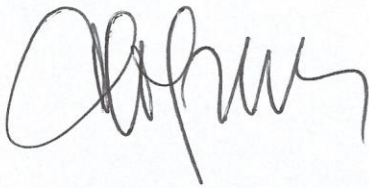
The purpose of this research is to look how the impact of fiscal policy credibility on inflation in Indonesia. The data was taken in this study is a quarter of the data in Central Bank of Indonesia, BPS and the Ministry of Finance which covers the period 2001 (1) through 2013 (4). This study used a simple multiple linear regression model using eviews 8 application, the data show that the credibility of fiscal policy results in the deficit rules was not significant about 0.73 with a -0.24 of negative coefficient and shows that the credibility of the deficit rules is still less credible in an inflationary environment. As for the credibility of debt rules is 0.003 with a -0.31 of negative coefficient and shows that the credibility of debt rules has good credibility and able to decrease the inflation, As for the discretionary was not significant about 0.59 with -0.004 of negative coefficient then explained the inflation. Then the last variable is openness as seen from the real sector was export and import significant about 0.01 with 0.07 positive coefficient and be impacted to inflation. So it can be said that the credible fiscal policy on inflation proved to be statistically more quickly to achieve the balancing rather than fiscal policy which not credible.

Keywords : *Credibility of Deficit rule, Credibility of Debt rule, Discretionary, Openness, Inflation*

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Nama : Nella Damayanti Hutauruk
No. Registrasi : 8105120482
Judul : Dampak Kredibilitas Kebijakan Fiskal Terhadap Inflasi
Di Indonesia

Dosen Pembimbing I



DR. Harvo Kuncoro W, SE, M.Si

NIP. 197002072008121001

Dosen Pembimbing II

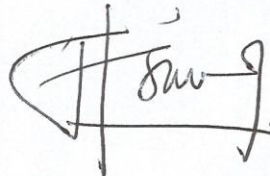


Karuniana Dianta A.S S.IP, ME

NIP. 198009242008121002

Ketua Program Studi

Pendidikan Ekonomi



Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si

NIP. 197201141998022001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

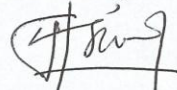
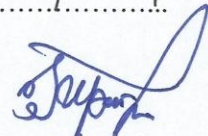

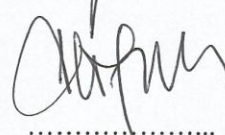
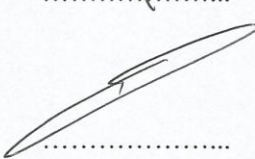
Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Dedi Purwana, ES, M.Bus

NIP. 196712071992031001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si</u> NIP. 197201141998022001	Ketua Penguji		27 Juni 2016
<u>Suparno, M.Pd</u> NIP. 197908282014041001	Sekretaris		28 Juni 2016
<u>Dicky Iranto, SE, M.Si</u> NIP. 197106122001121001	Penguji Ahli		27 Juni 2016
<u>Dr. Haryo Kuncoro W, SE, M.Si</u> NIP. 197002072008121001	Pembimbing I		27 Juni 2016
<u>Karuniana Dianta A. S, S.IP, M.E</u> NIP. 198009242008121002	Pembimbing II		27 Juni 2016

Tanggal Lulus : 16 Juni 2016

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, 16 Juni 2016

Yang membuat pernyataan



Nella Damayanti Hutauruk

NIM. 8105120482

MOTTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN

“Orang yang ingin bergembira harus menyukai kelelahan akibat bekerja”

-Plato-

Terkadang rasa malas, lelah dan jenuh menghampiri ku dikala menyelesaikan skripsi ini, namun memang dalam mencapai sebuah cita-cita dibutuhkan 1000 tekat dalam mencapainya, 1000 usaha dalam menjalankannya dan 1000 kali lebih doa yang harus dipanjatkan kepada Sang Pencipta. Dan aku percaya kekuatan doa merubah segala sesuatu.

“If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer”

-Matthew 21 : 22-

Kita dapat merencanakan sesuatu yang terbaik untuk cita-cita kita, namun Tuhan lah yang menentukan hasilnya

-and i know that You can do all things, no plan of Yours can be thwarted”

-Job 42:1-

“the best way to predict the future is to create it”

Perubahan atas diri kita bukan orang lain yang merubahnya, melainkan diri kita sendiri. Hanya ada 2 pilihan di hidup kita, pertama apakah ketika kita jatuh hanya berdiam diri atau kita jatuh lalu bangkit. Kita hanya perlu melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk merubah masa depan yang lebih baik diiringi dengan *ora et labora* atau 3B (berusaha, berjuang, dan berdoa).

“Harta yang paling berharga adalah keluarga”

Tanpa keluarga semangat ku patah, tanpa keluarga hidupku tak ada, dan tanpa keluarga aku mati bagaikan tumbuhan ditengah padang gurun, oleh karena itu aku persembahkan skripsi ini untuk Almh.opungku Melkia Hutabarat, untuk Almh.embahku Sawilah, untuk bapakku Ronald Hutauruk, untuk mamaku Mawarti B Noto, dan untuk abang ku Jonathan

Kriswanto Hutauruk.

Terimakasih yang sangat tak terhingga untuk segenap ketulusan, cinta, kasih dan sayang yang telah kalian berikan untukku.

Untuk sahabat-sahabat ku tercinta aku tak tahu bagaimana cara berterimakasih kepada kalian, aku sangat beruntung memiliki sahabat seperti kalian. Terimakasih ku untuk mu sahabatku Riyanti Puspitawati, Fitri Ovi Yanti, Irma Audryne, Kaenah Karlina, Wendy

Billiam, Chaflah Kuhafah, Dini Aulia dan Aulia Hasanah.

Dan yang terakhir skripsi ini aku persembahkan untuk dosen pembimbing ku yang senantiasa membimbing ku, dan selalu sabar dalam menghadapi aku. Teruntuk bapak DR. Haryo Kuncoro W, SE, M.Si dan bapak Karuniana Dianta A. Sebayang, ME.

Akhirnya perjuangan tidak akan pernah berakhir sia-sia karena tidak ada satupun hasil yang menghianati prosesnya.

Aku Berjuang, Aku Berdoa, dan Aku Menang

-PRAISE THE LORD-

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Dampak Kredibilitas Kebijakan Fiskal terhadap Inflasi di Indonesia*” dengan baik. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan, bantuan serta bimbingan baik secara moril maupun materi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Haryo Kuncoro W, SE, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing, serta memberikan banyak ilmu, arahan, petunjuk, dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan perhatian .
2. Bapak Karuniana Dianta A. Sebayang, S.IP, M.E selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing serta memberikan arahan dan motivasi sampai akhir penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan selaku ketua penguji dalam penelitian ini.
4. Bapak Dicky Iranto, SE, M.Si, selaku penguji ahli dalam penelitian ini.
5. Bapak Suparno, M.pd, selaku sekretaris penguji dalam penelitian ini.

6. Bapak Dr. Dedi Purwana, E.S, M.Bus, selaku Dekan Jurusan Ekonomi dan Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan bimbingan baik ilmu maupun semangat kepada penulis.
8. Kedua orang tua ku Ronald Hutauruk dan Mawarti B Noto, serta abang ku Jonathan Kriswanto Hutauruk yang berperan sangat penting dalam proses penulisan skripsi ini dengan memberikan bantuan baik secara moral maupun materi.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan Pendidikan Ekonomi Koperasi 2012 khususnya Chafлах Kuhafah, Nabila Saras Putri, dan Siska Lumban Gaol. Serta teman seperjuangan KKN di Kadutomo, Banten yaitu Dini Aulia Nur Oktavia, Aulia hasanah, Lia Masitoh, Siti Hernawati, dan Maryam yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penyusun untuk menyelesaikan penelitian ini
10. Seluruh sahabat penulis yaitu Riyanti Puspitawati, Fitri Ovi Yanti, Kaenah Karlina, Irma Audyne, Wendi Billiam, Oma Noni Rahman, Kesya, ka Kartika Haditono, dan ka Wiwie Christian, yang telah memberikan motivasi dan semangat yang tak henti untuk penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Demikian kata pengantar yang dapat penulis sampaikan, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai peningkatan dalam pengetahuan. Penulis mohon maaf bila dalam penyusunan skripsi ini terdapat kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan selama penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran serta kritik yang membangun

untuk melengkapi dan menyempurnakan penelitian ini. Akhirnya kata penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, 16 Juni 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nella Damayanti Hutaeruk' with a stylized flourish at the end.

Nella Damayanti Hutaeruk
Nim. 8105120482

DAFTAR ISI

JUDUL	i
TITLE	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
MOTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB PENDAHULUAN

I

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Pembatasan Masalah.....	11
D. Perumusan Masalah.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	11

BAB KAJIAN TEORETIK

II

A. Definisi Konseptual	
1. Inflasi.....	13
2. Kredibilitas Kebijakan Fiskal.....	20
B. Hasil Penelitian yang relevan.....	31
C. Kerangka Teoretik.....	36

D.	Perumusan Hipotesis Penelitian.....	41
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
A.	Tujuan Penelitian.....	42
B.	Objek dan Ruang Lingkup Penelitian.....	42
C.	Metode Penelitian	
1.	Metode.....	42
2.	Konstelasi Hubungan antar variabel	47
D.	Jenis dan Sumber Data.....	48
E.	Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	49
F.	Teknik Analisis Data	
1.	Uji Linieritas.....	52
2.	Persamaan Regresi Linier Berganda.....	52
3.	Koefisien Determinasi.....	53
4.	Uji T.....	54
5.	Uji F.....	55
6.	Uji Klasik	
a.	Uji Normalitas.....	56
b.	Uji Autokorelasi.....	57
c.	Uji Heterokedastisitas.....	58
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
A.	Deskripsi Data.....	60
1.	Inflasi.....	62
2.	Kredibilitas Kebijakan Fiskal.....	65
B.	Pengujian Hipotesis	
1.	Uji Linieritas.....	70

2. Analisis Regresi Linier Berganda.....	71
3. Koefisien Determinasi.....	75
4. Uji t.....	75
5. Uji F.....	76
C. Uji Asumsi Klasik	
1. Uji Normalitas.....	76
2. Uji autokorelasi.....	78
3. Uji Heterokedastisitas.....	79
D. Pembahasan.....	80

BAB KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN
V

A. Kesimpulan.....	92
B. Implikasi.....	93
C. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA.....	97
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	99
----------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP.....	110
---------------------------	------------

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul	Halaman
Tabel IV.1	Statistik Deskriptif.....	60
Tabel IV.2	Inflasi tahun 2001(1) – 2013(4).....	62
Tabel IV.3	Perencanaan dan Realisasi APBN tahun 2001- 2013.....	65
Tabel IV.4	Total Utang Pemerintah tahun 2001-2013.....	66
Tabel IV.5	Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda.....	71
Tabel IV.6	Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda Dengan Dummy 2005 tentang <i>inflation targeting</i>	73
Tabel IV.7	Hasil Uji Autokorelasi.....	79
Tabel IV.8	Hasil Uji Heterokedastisitas.....	79

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul	Halaman
Gambar II.1	Demand Pull Inflation.....	15
Gambar II.2	Cost Push Inflation.....	17
Gambar IV.1	Inflasi tahun 2001-2013.....	64
Gambar IV.2	Model Aturan Defisit dan Aturan utang Tahun 2001-2013...	67
Gambar IV.3	Model Diskresi dan Openness tahun 2001-2013.....	69
Gambar IV.4	Hasil Uji Normalitas dalam <i>E Views</i>	77
Gambar IV.5	Hasil Uji Normalitas dalam P-Plot SPSS.....	78

DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul	NO Halaman
1	Statistif Deskriptif Eviews.....	99
2	Data Inflasi 2001(1) – 2013(4).....	100
3	Perencanaan dan Realisasi APBN Tahun 2001- 2013.....	101
4	Total Utang Pemerintah Tahun 2001-2013.....	101
5	Data Ekspor Tahun 2001(1) – 2013(4).....	102
6	Data Impor Tahun 2001(1) – 2013(4).....	103
7	Hasil Estimasi Analisis Regresi Linier Berganda.....	104
8	Hasil Estimasi Analisis Regresi Linier Berganda dengan Variabel Dummy 2005.....	104
9	Uji Autokorelasi.....	105
10	Uji Heterokedastisitas Metode Harvey.....	106
12	Pengolahan Data.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata inflasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*inflate*”, yang memiliki arti menggelembung¹. Inflasi itu sendiri biasa dikatakan sebagai suatu kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus, kenaikan harga satu atau dua barang ini tidak dapat dikatakan sebagai inflasi kecuali bila kenaikan tersebut meluas terhadap barang-barang lainnya. Inflasi adalah fenomena yang selalu ada di setiap negara dan merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian suatu negara. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan pada akhirnya akan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengendalian inflasi penting untuk dilakukan karena didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif terhadap kondisi ekonomi dan sosial.

Dampak negatif tersebut menjadikan inflasi sebagai salah satu penyakit ekonomi yang ada di setiap negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Padahal satu sisi inflasi dapat memberikan manfaat, sebagaimana dapat diambil contoh dari peningkatan angka inflasi di Amerika Serikat sebesar empat persen selama beberapa tahun terakhir krisis, hal tersebut secara signifikan dapat membantu proses pengurangan (*deleveraging*) utang publik maupun swasta². Namun disisi lain, kenaikan angka inflasi

¹ Boediono. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.5 Ekonomi Moneter*. (Yogyakarta : BPF, 2012), P.112

² Carmen M Reinhart & Kenneth S.Rogoff, *This Time is Different : A Panoramic View of Eight Centuries of Financial Crises*. (England : 2008), p.7

memaksa pemerintah untuk merevisi tingkat inflasi yang ditargetkan dan akan diikuti oleh kenaikan suku bunga.

Perekonomian Amerika Serikat merupakan salah satu lokomotif perekonomian dunia. Pada tahun 2001, perekonomian Amerika Serikat mengalami perlambatan dari pada perkiraan sebelumnya. Keadaan ini menimbulkan ketakutan akan adanya resesi global di tahun mendatang, perkiraan perlambatan perekonomian dunia ini diduga akan terus berlangsung di tahun 2002 hingga merambat ke negara lainnya termasuk Indonesia. Namun ternyata dugaan tersebut salah karena di Indonesia pada tahun 2002 laju inflasi lebih rendah dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena menguatnya nilai tukar rupiah, kebijakan pengendalian defisit APBN yang diupayakan turun dan kebijakan moneter yang hati-hati dengan target pertumbuhan uang primer sebesar 12-13 persen.³

Hingga pada tahun 2005 laju inflasi kembali meningkat mencapai angka 17,11 persen. Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Chairul Mahsum mengatakan bahwa kenaikan inflasi di tahun 2005 ini disebabkan oleh adanya kenaikan harga bbm (bahan bakar minyak) yang terus memicu kenaikan harga angkutan umum serta kenaikan bahan makanan⁴. Hal ini dikarenakan Krisis energi dunia yang ditandai dengan naiknya harga minyak dunia dan menjadi sebuah krisis energi untuk Indonesia. Pada tahun 2005 kenaikan harga BBM mencapai 126% dengan menetapkan harga minyak tanah sebesar Rp 2.500/liter. Sementara harga bensin premium naik menjadi Rp 6.000/liter dan minyak solar sebesar Rp 5.500/liter. Kemudian pada bulan Desember 2005 terjadi deflasi sebesar 0,04 persen. Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga pada kelompok harga bahan makanan, pendidikan, rekreasi dan olahraga.

³ Lembaga Penelitian Ekonomi IBII, *Makro Ekonomi Indonesia*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002), p. 24

⁴ Hwa Katli, *Ekonomi Kaki – Lima*, (Jakarta : 2014), P. 183

Kemudian di tahun selanjutnya inflasi mulai turun, hingga terjadi kenaikan kembali di tahun 2008 yang disebabkan karena krisis finansial global yang sudah mulai menimpa berbagai negara maju dan berkembang akibat kesulitan likuiditas dan naiknya harga komoditi primer. Pada awalnya ketika krisis finansial global mulai merebak, sektor keuangan di Indonesia belum terkena dampak yang berarti, karena tidak ada perbankan Indonesia yang terpapar langsung dengan krisis di Amerika Serikat yang telah merugikan banyak lembaga keuangan raksasa di dunia.

Selama tahun 2008, masyarakat masih bisa menikmati bunga rendah ketika Bank Indonesia menurunkan BI rate sampai 8%. Namun setelah harga minyak bumi terus melesat BI rate naik, dan sektor konsumsi mulai melambat pertumbuhannya. Dampak krisis finansial global mulai dirasakan pada triwulan III tahun 2008, yang ditandai dengan makin sulitnya likuiditas yang dialami lembaga keuangan, sementara Bank Indonesia meningkatkan BI rate untuk menjaga inflasi yang melambung semenjak harga bahan bakar minyak dinaikkan pada awal Juli 2008.

Pertumbuhan ekonomi juga mengalami titik balik, ketika harga berbagai komoditas ekspor menurun menyusul harga minyak dunia yang menurun secara drastis. Ketakutan masyarakat dunia akan terjadinya resesi telah menyebabkan menurunnya permintaan terhadap berbagai produk sehingga harga terus menurun. Akibatnya, Indonesia yang semula mengandalkan ekspor sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi mulai memasuki masa sulit. Berbagai industri manufaktur terutama yang berorientasi ekspor seperti tekstil mulai mengurangi kegiatannya termasuk mengurangi tenaga kerja karena permintaan pasar ekspor yang menurun.

Keresahan akan inflasi ini sering menjadi beban bagi masyarakat, seperti yang dikatakan oleh Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden di Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatakan bahwa inflasi dianggap sebagai musuh rakyat dan sebagai musuh ekonomi yang paling besar⁵. Hal ini dikarenakan inflasi dapat mengakibatkan lemahnya efisiensi dan produktivitas ekonomi investasi, kenaikan biaya modal serta ketidakjelasan biaya dan pendapatan di masa yang akan datang.

Melihat dari kenaikan tingkat inflasi di beberapa negara khususnya Indonesia yang makin meresahkan, maka masalah inflasi ini mendapat perhatian yang besar dari para pemerintah maupun masyarakat umum. Berbagai teori dan kebijakan dikembangkan untuk mengatasi inflasi diantaranya terdapat kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

Dalam tiga dekade terakhir, minat terhadap kebijakan ekonomi makro yang berdasarkan atas aturan (*rule-based policy*) ini makin mengalami peningkatan. Di area ekonomi moneter, sejak diperkenalkan di Selandia Baru, Kanada, Inggris, Swedia, dan Australia pada awal tahun 1990-an, penargetan inflasi (*inflation targeting*) telah diangkat dibanyak Negara. Sampai saat ini, tercatat 32 negara di seluruh dunia yang mengangkat penargetan inflasi dalam kerangka kerja kebijakan moneter.

Sejalan dengan kecenderungan di atas, di bidang ekonomi publik, aturan fiskal (*fiscal rule*) mendapat popularitas yang cukup besar diberbagai belahan dunia. Awalnya, didorong oleh defisit anggaran yang tinggi di tahun 1970-an, sebanyak 87 negara saat ini telah memberlakukan aturan fiskal. Aturan fiskal ini diformalkan pada pembatasan numerik dalam variabel fiskal agregat yang relevan, seperti pendapatan, pengeluaran,

⁵ Hwa Katli, *op.cit.*, P. 185

defisit, dan utang. Dan memiliki satu tujuan, yaitu berusaha untuk memberikan kredibilitas terhadap pelaksanaan kebijakan ekonomi makro⁶.

Krisis keuangan global yang terjadi pada pertengahan tahun 2008 memberikan tantangan tersendiri terhadap aturan kebijakan tersebut yang menimbulkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Fakta menunjukkan bahwa banyak negara berkembang dan negara maju mengalami defisit anggaran yang tinggi dan utang publik tidak berkelanjutan. Posisi fiskal yang tidak berkelanjutan memiliki dampak negatif pada tingkat bunga pasar sehingga dampak berikutnya adalah kenaikan ekspektasi inflasi dan pada akhirnya berpengaruh kepada tingkat inflasi itu sendiri.

Cara membiayai defisit anggaran yang tinggi salah satunya dengan melakukan pencetakan uang (*printing money*), namun pencetakan uang (*printing money*), pada tingkat yang melebihi permintaan menciptakan kelebihan saldo kas atau uang beredar ditangan masyarakat, dan hal ini dapat juga menimbulkan inflasi yang tinggi, sehingga pencetakan uang (*printing money*) tidak diperbolehkan dalam membiayai defisit anggaran. Dalam Perekonomiannya Indonesia pada akhir tahun 2012 menunjukkan adanya defisit anggaran meskipun masih dalam skala rendah, A. Tony Prasetyantono sebagai kepala pusat studi ekonomi dan kebijakan publik Universitas Gajah Mada menjelaskan bahwa bukan tidak mungkin defisit akan melebar sehingga cadangan devisa akan terkuras dan melemahkan nilai rupiah, selanjutnya inflasi akan naik terutama dikarenakan kenaikan barang impor⁷.

Dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, presiden selaku kepala pemerintahan di negara Indonesia memegang kekuasaan pengelolaan

⁶ George Kopits, *Fiscal Rules : Useful Policy Framework or Unnecessary ornament?*, (Italia : 2001), p.15

⁷ Hwa Katli, *Op.Cit*, p.186

keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Pada setiap awal tahun anggaran, dalam pidatonya presiden menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk satu tahun yang akan datang di depan sidang MPR/DPR. Salah satu materi penting yang disampaikan adalah besaran belanja pegawai pemerintah dalam RAPBN yang diperkirakan menjadi penyebab dalam defisit anggaran, karena menyangkut hajat hidup para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia.

Gaji PNS ini merupakan representasi dari belanja pegawai pemerintah yang tertuang di dalam RAPBN. Namun, tujuan utama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan PNS dengan menaikkan gajinya terkadang menjadi masalah, karena dengan kenaikan gaji PNS dapat mengakibatkan defisit anggaran dan kenaikan gaji pegawai membawa dampak *announcement effect* dimana harga-harga barang sudah merangkak duluan sebelum kenaikan gaji diumumkan. Kenaikan harga-harga tersebut terkadang lebih besar daripada rencana kenaikan gaji pegawai.

Kemudian dari sisi penerimaan di sektor pajak, banyak oknum yang melakukan korupsi terhadap pajak sehingga mengakibatkan kurangnya pendapatan dan berujung pada tingginya defisit anggaran, wakil ketua KPK bidang penindakan Bambang widjojanto menyatakan bahwa: “tindak pidana yang dilakukan koruptor telah mengambil hak-hak sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai, pemiskinan koruptor lewat penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPU) dapat mencegah inflasi”⁸. Banyaknya tindak korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum ini menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah, karena kurangnya kedisiplinan dalam kebijakan

⁸ Ibid, p.186

fiskal dan hal ini yang menjadi salah satu alasan rendahnya kebijakan fiskal dalam mengatasi masalah ekonomi, sehingga kebijakan moneter lebih dipercaya dalam mengatasi masalah ekonomi makro tersebut.

Seperti banyak literatur ekonomi Klasik menyarankan bahwa inflasi adalah masalah moneter sehingga penanggulangannya ditempuh melalui kebijakan moneter. Dalam kasus krisis finansial global, kebijakan moneter dengan menetapkan suku bunga rendah (*zero lower bound*) ternyata tidak menyelesaikan masalah inflasi⁹. Secara teori, penargetan inflasi mensyaratkan adanya sistem kurs bebas. Dalam perekonomian dengan pergerakan modal yang bebas, gejolak kurs menjadi harga yang harus dibayar. Melihat kenyataan tersebut, masalah inflasi akan lebih banyak dibebankan pada kebijakan fiskal. Statement standard dari menteri keuangan Negara Indonesia mengatakan bahwa: “kondisi inflasi yang cenderung tinggi pasti harus disikapi dengan bauran kebijakan moneter dan didukung oleh kebijakan fiskal”¹⁰.

Namun, dalam lingkungan inflasi tinggi, belanja fiskal akan meningkatkan ekspektasi inflasi dan biaya pinjaman, yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan fiskal. Dalam ketidakpastian tersebut, efek kepercayaan cenderung menjadi lebih penting dan bagaimana cara merespon akan sangat tergantung pada kebijakan pemerintah dan kredibilitasnya¹¹. Kebijakan yang konsisten dan kredibel adalah keputusan yang tidak berubah-ubah setiap saat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan itu sendiri.

⁹ Lawrence, Christiano, Martin, Eichenbaum, Sergio, Rebelo. *When Is the Government Spending Multiplier Large?*. (Journal of Political Economy, Vol. 119, No. 1 : February 2011), p.118

¹⁰ Anggito Abimanyu, Andie Megantara, “Era Baru Kebijakan Fiskal”, (Jakarta : Kompas, 2011). P.12

¹¹ Tang, H.C., Liu, P., And Cheung, E.C, *Changing Impact Of Fiscal Policy On Selected Asean Countries*, (Adb Working Paper Series On Regional Economic Inte-Gration No. 70 : 2010).

Kredibilitas kebijakan fiskal telah banyak disebut-sebut sebagai salah satu dasar yang paling penting dari kebijakan ekonomi makro. Secara umum, dapat diterima secara luas bahwa pemerintah dengan reputasi kuat dan menempuh kehati-hatian fiskal tidak perlu dibatasi oleh aturan. Pemerintah memiliki kredibilitas fiskal yang buruk di dalam pengeluaran anggaran. Kebanyakan pengeluaran anggaran pemerintah digunakan untuk belanja rutin negara misalnya digunakan untuk gaji pegawai negeri yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian untuk subsidi minyak, dan pembayaran bunga utang. Hal ini dapat mencerminkan kurangnya disiplin fiskal, yang pada umumnya berasal dari penggunaan diskresioner kebijakan fiskal.

Kebijakan diskresioner memang mampu merespon guncangan yang tak terduga, namun demikian kebijakan diskresioner juga dapat menjadi salah sasaran, sehingga defisit terus-menerus dan kebijakan mengarah pada pro-siklikal, meningkatnya tingkat utang, dan dari waktu ke waktu akan kehilangan kredibilitasnya. Pada akhirnya jika tidak ada kredibilitas, kebijakan fiskal menjadi tidak berkelanjutan (*sustainable*) akan berdampak pula pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Utang yang meningkat di tengah ketidakstabilan perekonomian global akan membuat tekanan terhadap anggaran. Utang bukan solusi untuk meredam tekanan fiskal, justru utang berpotensi mengurangi kredibilitas kebijakan pemerintah dimata publik jika tidak digunakan dengan optimal. Pada saat yang sama peningkatan tajam dalam defisit fiskal dan utang publik telah menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan keuangan publik dan menyoroti kebutuhan untuk penyesuaian yang signifikan dalam jangka menengah. Menurut UU No. 17/2003, sejak tahun 2004 Indonesia telah menerapkan aturan kebijakan fiskal berdasarkan defisit dan utang (maksimal masing-masing 3 dan 60

persen dari PDB) menggantikan aturan anggaran berimbang yang telah dilaksanakan sejak tahun 1967¹².

Kemudian pada tahun 2008, pemerintah berusaha untuk mempertahankan kegiatan ekonomi melalui berbagai langkah stimulus fiskal guna menghadapi dampak negatif dari krisis keuangan global. Bahkan, program stimulus fiskal telah memberikan kontribusi besar terhadap Indonesia. Melihat hal tersebut masalah dalam ekonomi makro ini lebih banyak diperankan oleh kebijakan fiskal dari pada kebijakan moneter atau *inflation targeting* oleh bank sentral. Namun uniknya, aturan tersebut belum diuji. Padahal, kinerja fiskal Indonesia telah secara signifikan lebih baik dari batas yang terkandung dalam aturan fiskal¹³. Bukti-bukti empiris secara internasional menunjukkan bahwa aturan fiskal dapat memberikan kerangka yang berguna untuk kebijakan fiskal dan akhirnya dapat berkontribusi terhadap inflasi di Indonesia. Namun kredibilitas dari kebijakan fiskal di Indonesia masih kurang diminati oleh publik.

Fakta tersebut membawa kita kembali pada tantangan target inflasi dalam teori secara dominan, yang biasanya diam tentang peran kebijakan fiskal yang kredibel dan hal itu dapat menjadi perhatian lebih lanjut. Dengan demikian, kredibilitas kebijakan fiskal telah banyak disebutkan sebagai salah satu dasar yang paling penting dari kebijakan makroekonomi, anehnya aturan tersebut belum diuji.

Melihat bahwa rendahnya kredibilitas kebijakan fiskal saat terjadi inflasi, maka penelitian ini sangat penting untuk diteliti karena untuk mengetahui sejauh mana kredibilitas kebijakan fiskal mampu memberikan dampak positif terhadap masalah dalam

¹² Snyder. W, *The Budget Impact On Economic Growth And Stability In Indonesia*, (*Ekonomi Dan Keuangan Indonesia*, 33(2) : 1985), P.21.

¹³ Blöndal, J.R., Hawkesworth, I., And Choi, H, *Budgeting In Indonesia*, (*Oecd Journal On Budgeting*, 2009/2).

makro ekonomi terutama inflasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia inflasi yang terjadi lebih dipercaya dengan kebijakan moneter, sementara kebijakan fiskal yang ada kurang dipercayai oleh publik, sehingga peneliti menjadikan inflasi sebagai variabel terikat yang akan diteliti dengan kredibilitas kebijakan fiskal sebagai variabel bebas. Dan tingkat kredibilitas kebijakan fiskal pada penelitian ini mencakup nilai kredibilitas kebijakan fiskal pada aturan defisit anggaran, aturan utang, kebijakan fiskal diskresioner, dan keterbukaan ekonomi (*openness*).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti mengidentifikasi masalah yang ada yaitu :

1. Rendahnya kredibilitas kebijakan fiskal dalam aturan defisit.
2. Rendahnya Kredibilitas kebijakan fiskal dalam aturan utang.
3. Tingginya kebijakan diskresioner.
4. Tingginya keterbukaan ekonomi.
5. Kurangnya disiplin fiskal.
6. Penerapan kebijakan moneter yang gagal.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, ternyata masalah inflasi memiliki penyebab yang sangat luas. Berhubung keterbatasan yang dimiliki peneliti dari segi waktu maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah “Dampak Kredibilitas Kebijakan Fiskal yang

dilihat dari sisi aturan defisit, aturan utang, diskresioner dan *openness* terhadap Inflasi di Indonesia”.

D. Perumusan Masalah

Dari pembatasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak kredibilitas kebijakan fiskal dalam aturan defisit terhadap inflasi di Indonesia?
2. Bagaimana dampak kredibilitas kebijakan fiskal dalam aturan utang terhadap inflasi di Indonesia?
3. Bagaimana dampak kebijakan fiskal diskresioner terhadap inflasi di Indonesia?
4. Bagaimana dampak *openness* terhadap inflasi di Indonesia?

E. Kegunaan Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaannya sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan, dan pengetahuan baru serta untuk referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang kredibilitas kebijakan fiskal terhadap inflasi yang ada di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan agar pemerintah Indonesia mampu meningkatkan perannya di dalam kebijakan fiskal khususnya untuk mengendalikan inflasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat publik terhadap kebijakan yang di ambil oleh pemerintah khususnya dalam kebijakan fiskal, serta dapat menumbuhkan

derajat kredibilitas masyarakat terhadap kebijakan fiskal pada saat terjadinya ketidakstabilan harga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual

1. Inflasi

a. Pengertian Inflasi

Inflasi secara umum merupakan masalah penting yang harus diselesaikan mengingat dampak bagi perekonomian yang bisa menimbulkan ketidakstabilan, pertumbuhan ekonomi yang lambat dan pengangguran yang selalu meningkat. Inflasi juga merupakan masalah yang selalu dihadapi di setiap perekonomian bahkan inflasi juga menjadi agenda utama politik dan pengambil kebijakan bagi pemerintah¹⁴.

Menurut Lipsey, dan Ragan Courant inflasi adalah kenaikan tingkat rata-rata dari semua harga. Ketika tingkat harga mengalami kenaikan maka inflasi menjadi positif, sebaliknya jika tingkat harga mengalami penurunan maka inflasi menjadi negatif¹⁵. Sementara Mc Eachern mengemukakan pengertian dari inflasi adalah sebagai kenaikan terus-menerus dalam tingkat harga suatu perekonomian akibat adanya kenaikan permintaan agregat dan penawaran agregat¹⁶. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa inflasi adalah Kemerostan nilai mata uang (Kertas) karena terlalu banyak beredar dan menyebabkan melambungnya harga barang-barang¹⁷.

Sadono Sukirno berkata bahwa :

“Inflasi adalah kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Dengan kata

¹⁴ Frederic S. Mishkin, *Can Inflation Targeting Work In Emerging Market Countries?*, (International Monetary Fund. March 15-16, 2004) p.13

¹⁵ Lipsey and Ragan Courant, *Macro Economics*, (Jakarta : Alfabeta, 1997), p.368

¹⁶ William A. Mc Eachern, *Ekonomi Makro*, (Jakarta : Salemba Empat, 2000), p.133

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000. P.200

lain, terlalu banyak uang akan tetapi yang memburu barang sedikit. Inflasi menunjuk pada harga-harga lain (harga perdagangan besar, upah, harga asset dan sebagainya)¹⁸.

Jadi dari beberapa pengertian inflasi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi yaitu kenaikan harga, bersifat umum dan berlangsung secara terus menerus. Dengan ketiga komponen ini dapat disimpulkan bahwa inflasi merupakan suatu kenaikan tingkat harga suatu barang yang bersifat umum dan berlangsung secara terus menerus hingga menimbulkan beberapa dampak negatif.

b. Jenis - Jenis Inflasi

Berdasarkan sifatnya, jenis-jenis inflasi adalah sebagai berikut¹⁹:

1. Inflasi ringan (< 10% setahun), ditandai dengan kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang kecil serta dalam jangka waktu yang relatif pendek.
2. Inflasi sedang (10%-30% setahun), ditandai dengan kenaikan harga yang relatif cepat atau perlu diwaspadai dampaknya terhadap perekonomian.
3. Inflasi berat (30%-100% setahun), ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi yang artinya harga-harga minggu atau bulan ini lebih tinggi dari minggu atau bulan sebelumnya.
4. Hiperinflasi (>100% setahun), dimana inflasi ini adalah inflasi yang paling parah akibatnya. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang, nilai uang merosot dengan tajam, Sehingga ditukar dengan barang. Harga-harga naik lima

¹⁸ Sadono sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008), p.162

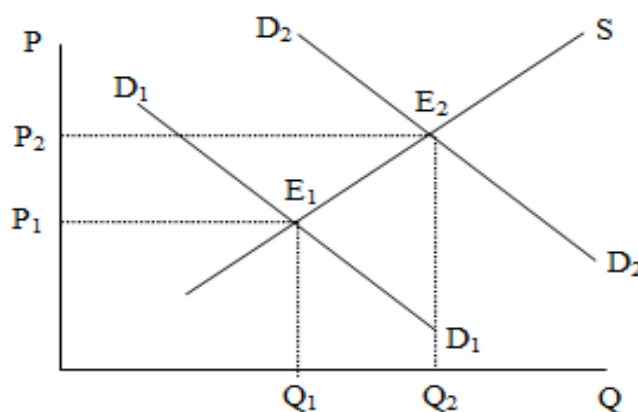
¹⁹ Boediono, *op.cit*, p.162

sampai enam kali lipat. Biasanya keadaan ini timbul oleh adanya perang yang dibelanjai atau ditutupi dengan mencetak uang (*printing money*).

Jenis inflasi menurut sebab terjadinya dibagi menjadi :

1. *Demand Pull Inflation*

Inflasi ini timbul karena permintaan akan berbagai barang yang terlalu kuat. Hal ini terjadi karena kenaikan permintaan agregat dimana kondisi perekonomian telah berada pada kesempatan kerja penuh (*Full Employment*). Jika kondisi produksi telah berada pada kesempatan kerja penuh, maka kenaikan permintaan tidak lagi mendorong kenaikan output ataupun produksi tetapi hanya mendorong kenaikan harga-harga yang disebut inflasi murni. Kenaikan permintaan yang melebihi produk domestik bruto akan menyebabkan *inflationary gap* yang menyebabkan inflasi. Berikut peneliti sajikan gambar 2.1 mengenai *demand pull inflation*.



Gambar 2.1 Demand Pull Inflation

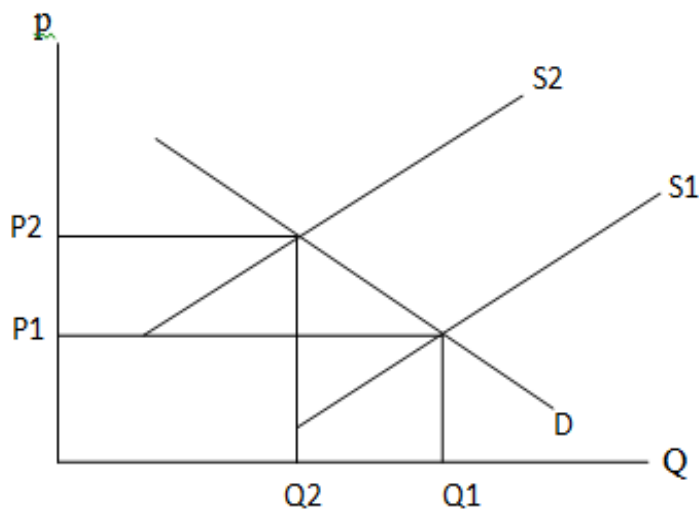
Sumber : Dernburg, Makro Ekonomi: Konsep, Teori dan Kebijakan, 1994²⁰.

²⁰ Dernburg, Thomas F, *Makroekonomi : konsep teori dan kebijakan*, (Jakarta : Erlangga, 1994), p.30

Sebagaimana dalam gambar 2.1, dimana perekonomian dimulai pada suatu tingkat harga mula-mula, P_1 dan Q_1 yang berada pada perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran, yaitu D_1 dan S , dan terjadi pergeseran kurva permintaan agregat ke D_2 , pergeseran ini disebabkan karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang, atau kenaikan permintaan luar negeri akan barang ekspor atau bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit yang murah. Sehingga terjadilah pergeseran kurva permintaan agregat dari D_1 ke D_2 , akibatnya tingkat harga umum naik dari P_1 ke P_2 .

2. *Cost Push Inflation*

Adalah inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi. Pada *Cost Push Inflation* tingkat penawaran lebih rendah dibandingkan tingkat permintaan, karena adanya kenaikan harga faktor produksi sehingga produsen terpaksa mengurangi produksinya sampai pada jumlah tertentu. Penawaran agregat terus menurun karena adanya kenaikan biaya produksi.



Gambar 2.2 Cost Push Inflation

Sumber : Dernburg, Makro Ekonomi: Konsep, Teori dan Kebijakan, 1994²¹.

Pada gambar 2.2 dapat dilihat bahwa bila biaya produksi naik misalnya dikarenakan kenaikan harga sarana produksi yang didatangkan dari luar negeri atau karena kenaikan harga bahan bakar minyak, maka kurva penawaran masyarakat (*aggregate supply*) akan bergeser dari S_1 ke S_2 . Pengaruh pergeseran penawaran tersebut tentu saja menjadi kenaikan dalam harga yang terkadang disebut sebagai inflasi dorongan biaya.

Jenis inflasi menurut asalnya dibagi menjadi²².

1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*). Inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul misalnya karena defisit anggaran belanja, panen gagal dan sebagainya.

²¹ Dernburg, Thomas F, Op.Cit, p.31

²² Boediono, Op.Cit, p.164

2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*). Penularan inflasi dari luar negeri ke dalam negeri ini dapat mudah terjadi pada negara-negara yang perekonomiannya terbuka. Penularan inflasi ini dapat terjadi melalui kenaikan harga-harga, baik itu impor maupun ekspor, baik secara *demand full inflation* maupun *cost push inflation*.

c. Teori Inflasi

Ada 3 teori yang membahas mengenai inflasi, yaitu diantaranya teori Kuantitas, teori Keynes dan teori Strukturalis²³.

1. Teori Kuantitas

Teori ini menjelaskan inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar, tanpa ada kenaikan jumlah uang yang beredar seperti kegagalan panen hanya akan menaikkan harga-harga untuk sementara waktu saja, berbeda dengan jumlah uang beredar yang dikarenakan kenaikan harga bahan bakar. Selanjutnya menurut teori ini laju inflasi ditentukan oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa mendatang.

2. Teori Keynes

Teori ini berasal dari John Maynard Keynes yang menjelaskan bahwa inflasi terjadi karena kenaikan permintaan agregat²⁴. Menurutnya inflasi yang terjadi dikarenakan masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya, sehingga menjadi keadaan dimana permintaan lebih banyak dari pada penawaran barang dan jasa yang disebut

²³ Sadono Sukirno, Op.Cit, p.172

²⁴ Boediono, Log.cit

sebagai *demand pull inflation* dan dalam keadaan *full employment*. Inflasi ini terjadi karena naiknya tingkat pendapatan masyarakat sehingga cenderung membeli barang dan jasa lebih banyak dari yang biasanya mereka konsumsi.

3. Teori Strukturalis

Teori ini dikembangkan dari struktur perekonomian negara-negara berkembang, khususnya pengalaman atau struktur perekonomian negara Amerika Latin. Teori ini menjelaskan bahwa adanya kekakuan dari struktur ekonomi, yaitu yang pertama karena adanya kekakuan di dalam ekspor. Dimana nilai ekspor tumbuh lebih lambat daripada pertumbuhan pada sektor-sektor yang lain. Hal ini disebabkan karena naiknya harga barang-barang komoditi negara berkembang (hasil alam), dalam jangka panjang perkembangan sangat lambat dibandingkan harga barang industri. Adanya perkembangan ekspor yang lambat juga merupakan penyebab adanya kelambanan untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan (terutama barang modal untuk mengubah struktur perekonomian).

Dan yang kedua karena adanya kekakuan dari suplai atau produksi bahan makanan dalam negeri, yang berarti mengakibatkan pertumbuhan produksi bahan makanan tidak secepat pertumbuhan penduduk dan pendapatan di suatu negara. Teori strukturalis ini cocok dengan keadaan di negara berkembang, termasuk Indonesia sebagai objek dalam penelitian ini. Jadi menurut teori strukturalis ini inflasi bukan dikarenakan permintaan dan penawaran agregat melainkan karena kekakuan struktur ekonomi dalam perdagangan internasional.

2. Kredibilitas Kebijakan Fiskal

a. Pengertian Kredibilitas Kebijakan Fiskal

Para pelaku ekonomi pada dasarnya akan memberikan respon yang positif terhadap kebijakan yang kredibel dan konsisten. Kredibilitas suatu kebijakan ini ditentukan oleh bagaimana pemerintah dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakannya sendiri. Kredibilitas yang diharapkan ini berupa kebijakan yang mampu memberikan kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat. Tavares mengatakan bahwa: “kredibilitas berarti kegigihan, keberhasilan dan penyesuaian dalam suatu kebijakan”²⁵.

Menurut definisi kredibilitas yang dikemukakan oleh Baxter dan Hauner mengungkapkan bahwa: “kredibilitas adalah pikiran atau ide-ide yang tinggal di dalam pelaku pasar tentang seberapa dekat hasil kebijakan akan kebijakan yang diumumkan”²⁶. Jadi dari beberapa ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kredibilitas adalah suatu ide atau kebijakan yang digunakan dan berhasil disesuaikan dalam pelaku pasar atau masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang dibuat dapat mengatasi masalah yang ada khususnya dalam masalah makro ekonomi di Indonesia.

Kredibilitas menjadi sangat diharapkan saat pembuat kebijakan menjalankan kebijakan tersebut, hal ini untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat pada kebijakan yang dibuatnya, sebab jika kredibilitas kepada kebijakan tersebut sudah tidak ada maka pembuat kebijakan gagal dalam melaksanakan kebijakan yang dibuatnya.

²⁵ Hauner D, Jonáš J .And Kumar M.S, *Polic Y Credibility And Sovereign Credit: The Case Of The New Eu Member States*, (Imf Working Paper Wp07/1, 2007).

²⁶ Frank Naert & Stijin Gominne, *Measuring credibility of fiscal policies*, (University of Michigan, USA. 2011), p.5

Sehingga kredibilitas kebijakan itu harus diperhatikan karena kredibilitas memiliki pengaruh penting pada efektifitas kebijakan fiskal²⁷.

Dalam *setting* perekonomian secara umum, kebijakan Bank Sentral Indonesia untuk mengendalikan tingkat harga yaitu disebut dengan kebijakan moneter yang memiliki kredibilitas yang baik dimata publik dibandingkan dengan kredibilitas terhadap kebijakan fiskal. Hal ini terkait dengan adanya teori *quantity of money* oleh Milton Friedman yang menyatakan bahwa: “*inflation is always and everywhere a monetary phenomenon*”²⁸. Namun pandangan tradisional tersebut mendapat tantangan yang berbeda dari kaum fiskal, yaitu *fiscal theory of the price level (FTPL)* yang dikembangkan oleh Leeper dan Sims, yang menyatakan bahwa: “kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam penentuan harga melalui *budget constraint* yang berkaitan dengan *printing money*, utang pemerintah, pengeluaran dan perpajakan”²⁹. Dalam bukunya, Sadono Sukirno mendefinisikan kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi³⁰.

Jadi kredibilitas kebijakan fiskal adalah kepercayaan terhadap kebijakan fiskal yang dibuat oleh pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian kepada kondisi yang lebih baik dengan cara memperbaiki penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal mempunyai tujuan yang hampir sama dengan kebijakan moneter. Namun perbedaannya terletak pada instrumen kebijakannya. Jika dalam kebijakan moneter pemerintah mengendalikan peredaran uang atau jumlah uang beredar, maka

²⁷ Hsiao Chink Tang, Philip Liu, Eddie C. Cheung, *op.cit*, p.7

²⁸ Ndari Surjaningsih. Diah Utari. Budi Tristanto, *Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Output dan Inflasi*, (Buletin Ekonomi dan Perbankan, April 2012, ISSN 1410-8046), p.396

²⁹ Ndari Surjaningsih., Diah Utari., Dan Budi Tristanto., *log.cit*.

³⁰ Sadono Sukirno, *Op.Cit*, p.24

dalam kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan anggaran pemerintah berupa penerimaan dan pengeluarannya³¹.

b. Fungsi kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama dalam menstabilkan perekonomian yaitu fungsi alokasi anggaran digunakan untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi dengan tujuan meningkatkan pembangunan, fungsi distribusi yaitu fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat merata untuk semua kalangan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat contohnya yaitu pemberian subsidi, dan terakhir adalah fungsi stabilisasi sebagai stabilisator ekonomi agar terpeliharanya keseimbangan ekonomi.

c. Dampak Kebijakan Fiskal

Dampak kebijakan fiskal terdiri dari dampak kebijakan fiskal pada sisi permintaan dan dampak kebijakan fiskal pada sisi penawaran. Dampak terhadap perekonomian pada sisi permintaan agregat (*aggregate demand*) diterangkan melalui pendekatan Keynes, dimana Pendekatan Keynes mengasumsikan bahwa adanya *price rigidity* dan *excess capacity* sehingga output yang dihasilkan ditentukan oleh permintaan agregat (*aggregate demand*). Keynes menyatakan bahwa dalam kondisi resesi, perekonomian yang berbasis mekanisme pasar tidak akan mampu untuk pulih tanpa adanya campur tangan dari pemerintah.

³¹ Prathama, Rahardja, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makroekonomi dan Mikroekonomi*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2008), p.445

Keynes mengkritik kaum tradisional atau kaum klasik bahwa kebijakan moneter tidak berdaya untuk memulihkan perekonomian karena kebijakan hanya bergantung kepada penurunan suku bunga sementara pada kenyataannya dalam kondisi sedang resesi, tingkat suku bunga umumnya sudah rendah dan bahkan dapat mendekati angka nol. Keynes mengatakan bahwa terdapat peran pemerintah di dalam pengendalian perekonomian suatu negara dengan mengatur anggaran pemerintah, terutama pada sisi penerimaan.

Dampak terhadap perekonomian pada sisi penawaran agregat (*aggregate Supply*), hal ini disebabkan oleh motif produsen, karena tidak adanya subsidi yang diberikan dari pemerintah, adanya kenaikan tariff pajak, tidak ada perubahan harga input dan adanya perubahan teknologi. Dampak pada sisi penawaran (*Aggregate supply*) ini diterangkan melalui pendekatan Keynes yang mana terjadinya kekakuan dalam harga, yaitu adanya kenaikan harga namun kenaikan tersebut tidak dapat turun kembali, dan terjadi dalam jangka pendek dimana tetap adanya pengangguran, tetapi harga tetap naik karena input masih dapat dimaksimalkan.

d. Jenis Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dibagi menjadi 3 jenis yaitu :

1. Stabilisasi Otomatis (Auto Stabilizer)

Stabilitas otomatis adalah sebuah kebijakan fiskal yang secara otomatis berubah pada saat keadaan yang tak terduga dengan menstimulasikan atau memberi rangsangan untuk menekan perekonomian ketika diperlukan tanpa adanya perubahan kebijakan yang disengaja. Kebijakan fiskal otomatis ini meliputi:

1. Perubahan otomatis dalam penerimaan pajak

Dalam sistem pajak yang bebas suatu negara akan sangat tergantung kepada pajak perseorangan yang progresif dan pendapatan perusahaan. Sebab ketika mengalami kegagalan dalam pendapatan, maka jika pemerintah tidak membuat perubahan dalam tingkat pajaknya akan mengakibatkan penerimaan pajak menurun.

Dalam keadaan inflasi, kenaikan penerimaan pajak akan menurunkan pendapatan perseorangan, mengurangi pengeluaran konsumsi, mengurangi permintaan agregat dan memperlambat kenaikan harga dan upah.

2. Asuransi pengangguran, kesejahteraan, dan transfer payment lainnya

Asuransi pengangguran adalah salah satu bentuk transfer payment. Bentuk asuransi pengangguran ini terdapat di Amerika dan belum terdapat di Indonesia, asuransi ini memompa dana ke dalam atau keluar dari perekonomian dalam lingkaran / siklus yang berlawanan. Seperti dengan menaikkan pendapatan, stempel makanan, tunjangan untuk keluarga dengan ketergantungan anak dan obat-obatan.

Namun stabilisasi otomatis ini memiliki kelemahan seperti tidak akan sanggup mengatasi masalah inflasi pada masa-masa *inflatoir*, kemudian tidak dapat mewujudkan *full employment* tanpa terjadi inflasi, dan tidak mampu mengatasi masalah pengangguran secara nyata. Singkatnya kebijakan otomatis ini dilaksanakan untuk mengurangi sebagian dari banyaknya fluktuasi dalam perekonomian, tetapi tidak dapat menyempurnakan 100 persen dari penyimpangan yang ada.

2. Diskresioner (Discretionary)

Kebijakan diskresioner adalah kebijakan dimana pemerintah mengubah tariff pajak atau program-program pengeluaran. Dengan tujuan pengambilan kebijakan diskresioner

ini adalah untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian yang sedang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat, sehingga tetap tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi pada keadaan tingkat *full employment* dengan tanpa inflasi, selain itu untuk menjaga resesi dan menjaga inflasi ringan untuk tidak menjadi inflasi yang parah, kemudian untuk membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah dan membuat perubahan atas pajak yang dipungut. Kebijakan diskresioner ini kebalikan dengan stabilisasi otomatis, karena pada umumnya kebijakan diskresioner melewati lembaga – lembaga legislatif untuk mengubah struktur dan sistem fiskal³².

Kebijakan diskresioner digunakan oleh pemerintah ketika kebijakan penstabil otomatis tidak mampu mengendalikan kondisi, yaitu dengan mengubah tingkat pengeluaran atau pajak untuk menstabilkan permintaan agregat. Kebijakan fiskal ini digunakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi dinamakan kebijakan fiskal diskresioner³³. Kebijakan fiskal diskresioner ini meliputi pembuatan kebijakan tentang pekerjaan umum dan program pengeluaran pemerintah, kemudian tentang proyek padat karya dan tingkat pajak.

Menurut Sadono Sukirno,

“Kebijakan fiskal diskresioner adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluarannya dan pajaknya dengan tujuan pertama, untuk mengurangi naik turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu, dan menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja yang tinggi, tidak menghadapi masalah inflasi, dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan”³⁴.

Jadi kebijakan fiskal diskresioner ini merupakan kebijakan fiskal yang diambil dalam menanggapi perubahan perekonomian dengan tidak mengikuti seperangkat

³² Paul A Samuelson, *Makroekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 1992), p.347

³³ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, op. cit, p.179

³⁴ Sadono Sukirno, Op.Cit, P.188

aturan-aturan ketat. Kebijakan ini juga menggunakan penilaian subjektif untuk memperlakukan setiap situasi dengan cara yang unik.

Kebijakan pemerintah yang bersifat diskresioner dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu kebijakan fiskal mengembang (*expansionary fiscal policy*) dan kebijakan fiskal kontraksi atau mengecil (*contractionary fiscal policy*)

- a. Kebijakan fiskal mengembang (*expansionary fiscal policy*) merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk menambah pengeluaran negara, sehingga memperbesar kegiatan ekonomi dan meningkatkan pendapatan nasional. Kebijakan ini sering diambil ketika perekonomian sedang menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi dan tingkat investasi yang rendah.
- b. Kebijakan fiskal kontraksi (*contractionary fiscal policy*) merupakan kebijakan yang diambil dengan tujuan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, sehingga kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional berkurang. Kebijakan kontraksi umumnya diambil pemerintah ketika perekonomian negara sedang mengalami masalah inflasi yang tinggi dan defisit neraca pembayaran yang besar.

3. Kebijakan Fiskal dijalankan Menurut Aturan

Kebijakan yang dijalankan menurut aturan yaitu jika para pembuat kebijakan mengumumkan bagaimana kebijakan yang direncanakan akan menanggapi berbagai situasi dan bersungguh-sungguh dalam menjalankannya³⁵. Jadi kebijakan menurut aturan adalah kebijakan yang direncanakan untuk mengatasi masalah perekonomian. Aturan yang mendapat perhatian paling besar di Indonesia adalah aturan anggaran berimbang³⁶. Namun dengan adanya perubahan perundang-undangan menjadi No 17

³⁵ Gregory.Mankiw, Teori Makro Ekonomi Edisi Keempat, (Jakarta : Erlangga, 2000), p.358

³⁶ Ibid, p.366

tahun 2003, Indonesia sejak tahun 2004 telah menerapkan aturan defisit dan aturan utang.

Aturan Defisit (*Deficit rule*)

Berdasarkan pendekatan empiris langsung, bahwa tingkat defisit pemerintah akan dibiayai dengan utang pemerintah yang dapat berpengaruh terhadap kinerja inflasi, jadi indikator yang biasa digunakan dalam defisit anggaran adalah selisih antara pengeluaran pemerintah (dan juga pembayaran transfer) dengan penerimaan.

Kebijakan fiskal yang dilaksanakan pemerintah tertuang dalam anggaran APBN yang disusun setiap tahunnya. APBN merupakan instrument kebijakan fiskal, yang diupayakan secara optimal untuk meredam siklus bisnis atau fluktuasi ekonomi. Sebelum 2001, prinsip APBN adalah anggaran berimbang, dimana jumlah penerimaan harus sama dengan pengeluaran negara, dan jumlahnya diupayakan meningkat dari tahun ke tahun.

Namun, sejak perekonomian Indonesia terkena krisis ekonomi di tahun 1997 yang berdampak bagi berbagai aspek salah satunya yaitu meningkatnya inflasi. Pasca krisis, pemerintah berusaha memperbaiki perekonomian dengan melakukan kebijakan ekspansi melalui instrument pencetakan uang baru atau melakukan pinjaman luar negeri untuk menutup defisit anggaran. Hingga sejak tahun 2004 prinsip anggaran yang digunakan oleh pemerintah Indonesia bukan lagi anggaran berimbang melainkan defisit, dengan aturan jumlah batasan defisit anggaran sebesar 3% dari PDB tahun bersangkutan.

Alat utama kebijakan fiskal pemerintah adalah pajak dan subsidi, jika pemerintah menempuh kebijakan defisit anggaran, maka permintaan agregat akan meningkat, sebab untuk menempuh kebijakan anggaran defisit, pemerintah harus mengurangi pajak dan

atau menambah pengeluarannya. Keduanya akan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga akan menggeser kurva *aggregate demand*.

Aturan Utang (*Debt Rule*)

Untuk mengatasi defisit anggaran yang tinggi, maka pemerintah mencari bantuan dan meminjam dana baik dalam negeri maupun luar negeri, yang akhirnya dengan dana tersebut berdampak pada kenaikan harga di dalam negeri atau terjadi inflasi, yang kemudian merupakan babak awal keruntuhan ekonomi Indonesia³⁷. Corsetti menganalisis implikasi dari utang pemerintah pada saat resesi yang mendalam. Mereka menunjukkan bahwa pengeluaran dapat diantisipasi dengan fiskal ekspansif³⁸.

Utang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri, untuk masa era krisis pemerintah mencari bantuan atau utang luar negeri sehingga terjadi adanya penambahan uang untuk negara. Paradigma keynesian menjelaskan ketika pengeluaran pemerintah naik akan mengakibatkan tingginya defisit (dengan asumsi pendapatan dalam negeri tidak bisa mengejar belanja) sehingga untuk menutup defisit yang tinggi, maka pemerintah melakukan utang yang mengakibatkan utang publik juga akan naik. Kenaikan utang yang tinggi ini diperlukan adanya suatu batasan atau aturan untuk membatasi banyaknya utang yang menumpuk dan berdampak pada pembayaran utang di masa depan. Menurut undang-undang No 17 Tahun 2003 aturan pembatasan utang yaitu tidak melebihi 60% dari PDB yang bersangkutan.

³⁷ I Wayan Sudirman. *Kebijakan Fiskal dan Moneter*. (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2009) p.15

³⁸ Sadono Sukirno, Op.Cit, P.192

Keterbukaan Ekonomi (*openness*)

Dalam kenyataannya sebagian besar negara-negara mengaplikasikan sistem perekonomian terbuka. hampir semua negara-negara tersebut saling mengekspor atau mengimpor barang dan jasa³⁹.

Menurut pendapat Amir, ekspor adalah “mengeluarkan barang dari peredaran dalam masyarakat dan mengirim barangnya keluar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah dan mengharapkan pembayaran dalam bentuk valuta asing”⁴⁰. Sementara menurut pendapat dari Krugman dan Maurice mengemukakan bahwa: “ekspor merupakan salah satu bentuk perdagangan luar negeri yang memberikan keuntungan bagi suatu negara”.

Perdagangan akan menciptakan keuntungan dengan memberikan peluang kepada setiap negara untuk mengekspor barang-barang yang diproduksinya menggunakan sebagian besar sumber daya yang berlimpah dan mengimpor barang-barang yang diproduksinya menggunakan sumber daya yang langka⁴¹.

Berdasarkan UU pajak, yang dimaksud impor adalah kegiatan memasukan barang kena pajak dari luar daerah pabeaan ke dalam daerah kepabeaan⁴². Pengertian lain dari impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Dari definisi tersebut dikatakan bahwa proses impor harus dilakukan secara legal, oleh karena itu dibutuhkan campur tangan dari beberapa lembaga terkait yang mengatur prosedur tata laksana impor.

³⁹ Erni umi & Danang sunyoto, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Jakarta : CAPS, 2012) p.112

⁴⁰ Amir MS, *Strategi memasuki Pasar Ekspor Seri Bisnis Internasional* (Jakarta : PPM, 2004) p.3

⁴¹ Krugman dan Obstfeld, *Ekonomi Internasional :Teori dan kebijaksanaan* (Terjemahan Rajawali pers : Jakarta, 1994) p.15

⁴² Undang-Undang No 18 tahun 2000 tentang : Pajak perртambahan nilai barang dan jasa dan paja penjualan barang mewah.

Jadi ekspor adalah suatu kegiatan menjual hasil produksi barang dan jasa domestik keluar negeri melalui pelabuhan diseluruh wilayah. Perolehan dari kegiatan ekspor suatu negara merupakan injeksi atau masukan dana bagi negara yang bersangkutan, sementara impor adalah aktivitas memasukan produksi barang dan jasa dari luar negeri ataupun aliran pengeluaran untuk membeli barang-barang dari luar negeri. Derajat keterbukaan ekonomi adalah total perdagangan (ekspor + impor) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Arifin, S., Winantyo, R., Kurniati, Y., 2005)⁴³.

Dengan adanya keterbukaan terhadap Negara lain dalam suatu perekonomian memungkinkan suatu negara terkena dampak dari perdagangan tersebut yaitu ketika suatu negara yang terkena inflasi akan berdampak pada negara yang menjalin kerja sama didalamnya. Dalam hal ini kredibilitas kebijakan fiskal sangat dibutuhkan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Peneliti melihat terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang serupa mengenai inflasi dan kebijakan fiskal. Dari penelitian yang ada peneliti melihat persamaan antara penelitian-penelitian yang ada sebelumnya, namun peneliti juga melihat adanya perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dalam hal variabel kredibilitas yang digunakan, metode maupun perbedaan dalam data-data yang digunakan. Berikut adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya :

⁴³ Anggito Abimanyu, Andie Megantara, *op.cit.*, (Jakarta : Kompas, 2011). P.115

1. Philipp C Rother (2004)

Judul : “Fiscal Policy and Inflation Volatility”

Penelitian Rother ini menggunakan volatilitas inflasi sebagai variabel terikat dan kebijakan fiskal sebagai variabel bebas. Penelitian dilakukan dengan sampel pada tahun 1967 - 2001 dan menggunakan model GARCH. Tujuan penelitian ini untuk memberikan bukti yang menunjukkan bahwa kebijakan fiskal diskresioner mungkin telah berkontribusi terhadap volatilitas inflasi.

Hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Rother ini relatif lemah mengenai dampak kebijakan fiskal terhadap inflasi, hal ini mungkin karena kekakuan yang lebih tinggi dari kebijakan fiskal relatif terhadap kebijakan moneter. Kebijakan fiskal biasanya hanya memutuskan dan diimplementasikan pada frekuensi tahunan, sehingga sulit untuk mendeteksi dampak fiskal pada tingkat inflasi tahunan.

2. Haryo Kuncoro (2014)

Judul : “Does the Credible Fiscal Policy Support the Prices Stabilization”

Penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro ini bertujuan untuk menganalisa pergerakan antara aturan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam konteks stabilisasi harga. Dengan menggunakan metode pengukuran regresi dan dalam penelitian ini juga menambahkan variabel dummy *inflation targeting*.

Hasil dari penelitian yang dilakukan di Indonesia ini, terlihat pada Tabel pertamanya dimana terdapat nilai rata-rata kredibilitas aturan defisit ($Z1$) positif (0,0041), menunjukkan bahwa defisit yang sebenarnya lebih tinggi dari yang direncanakan. Sebaliknya, nilai rata-rata dari kredibilitas aturan utang ($Z2$) yang dilakukan dengan

penyaringan model Hodrick Prescott yang menyiratkan bahwa utang yang sebenarnya hampir sama dengan nilai yang diproyeksikan. Mengingat hasil yang di atas, kita dapat mengatakan bahwa kebijakan aturan utang lebih kredibel daripada kebijakan aturan defisit.

Haryo Kuncoro menyimpulkan bahwa hal kredibilitas biasanya tergantung pada karakteristik komitmen aturan fiskal namun di satu sisi, kredibilitas kebijakan aturan utang dapat mengurangi tingkat inflasi. Sebaliknya, aturan defisit tidak memiliki dampak pada tingkat inflasi dan karena itu tidak mendukung untuk menargetkan inflasi.

3. Ndari Surjaningsih, G. A. Diah Utari, dan Budi Trisnanto (2012)

Judul: “Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi”

Penelitian ini melihat dampak kebijakan fiskal terhadap output dan inflasi serta melihat apakah terdapat diskresi kebijakan fiskal dan bagaimana dampaknya terhadap volatilitas output dan inflasi. Menggunakan Vector Error Correction Model (VECM) yang diaplikasikan atas data triwulanan, mencakup periode 1990 - 2009.

Hasil penelitian ini membahas dampak shock pada pengeluaran pemerintah terhadap penurunan inflasi yang dapat dijelaskan oleh dampak multiplier dari pengeluaran pemerintah untuk investasi (diantaranya infrastruktur) yang lebih besar dibandingkan pengeluaran rutin. Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur diperkirakan dapat memperbaiki distribusi barang dan jasa sehingga berkontribusi terhadap penurunan inflasi.

4. Rosyetti dan Eriyati

Judul : “Pengaruh Defisit Anggaran Terhadap Inflasi Di Indonesia Tahun 1981-2010”

Penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan menggunakan data sekunder dari defisit anggaran dan inflasi Tahun 1981-2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh defisit anggaran terhadap inflasi di Indonesia dari Tahun 1981-2010. Dalam penelitian ini dilakukan dua analisis, yaitu analisis keseimbangan jangka panjang dengan menggunakan persamaan kointegrasi (cointegration test) dan analisis jangka pendek dengan metode regresi linier ECM (Error Correction Methode).

Kesimpulan dalam penelitian ini sejalan dengan Hasil penelitian dari Arti Adji (1996) yang mengambil data time series tahun (1974-1989) dengan menggunakan regresi OLS menghasilkan kesimpulan bahwa pembiayaan defisit anggaran yang dibiayai dengan utang luar negeri menyebabkan inflasi. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa R² adalah sebesar 0.551459. Nilai ini memberikan indikasi bahwa perubahan Defisit Anggaran menentukan variasi perubahan sebesar 55.1 % persen terhadap Inflasi selama periode 1981-2010 sementara 44.9 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.

5. Stefan Niemann, Paul Pichler & Gerhard Sorge (2013)

Judul : “Public debt, discretionary policy, and inflation persistence”

Mereka menjelaskan mekanisme sederhana yang menghasilkan ketekunan inflasi dalam model standar kekakuan harga dari kebijakan fiskal dan moneter yang optimal. Kunci mekanisme ini adalah bahwa kebijakan dilaksanakan di bawah kebijaksanaan. Insentif diskresioner pemerintah untuk mengikis nilai riil utang publik nominal dengan

cara inflasi yang mengejutkan dan akibatnya berlanjut sampai tingkat keseimbangan inflasi berkorelasi dengan stok utang publik.

Utang memungkinkan untuk meningkatkan pajak / mengurangi pengeluaran dalam menghadapi gangguan. Karena korelasi tersebut, kegigihan dalam utang membawa ke arah inflasi. Analisis mereka meliputi efek non-monoton dari kekakuan nominal pada ketekunan inflasi dan menunjukkan bahwa utang pemerintah di bawah kebijaksanaan yang tidak ada.

Penelitian ini telah memeriksa sifat dinamis dari inflasi dalam model kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang optimal di bawah kebijaksanaan. Dalam model ini, ada pemerintahan yang bijak tunggal yang hanya dapat menggunakan instrumen pajak, tetapi bisa mengeluarkan nominal utang kontingen suatu negara. Kurangnya komitmen dan dengan tingginya utang publik yang nominal, masalah pemerintah adalah untuk manfaat *trade off* dan biaya inflasi. Di satu sisi, inflasi diantisipasi dalam model yang digunakan merupakan suatu hal menarik karena mengurangi nilai riil dari kewajiban. Di sisi lain, inflasi adalah mahal karena mengurangi kemungkinan konsumsi saat ini dengan meningkatkan biaya transaksi.

Mekanisme kunci di balik temuan ini adalah bahwa keinginan pemerintah untuk memperlancar konsumsi menyiratkan bahwa utang publik dikeluarkan dalam menanggapi guncangan ekonomi makro. Kebijakan diskresioner optimal menghasilkan utang terus-menerus; dan ketekunan ini membawa pada inflasi.

6. Ahmad Jafari Samimi, Saman Ghaderi, Ramezan Hosseinzadeh, Younes Nademi (2012)

Judul : “ Openness and inflation: New empirical panel data evidence”

Penelitian dari Ahmad Jafari ini bertujuan untuk menguji hipotesis pertama kali yang dikemukakan oleh Romer pada tahun 1993, Romer dalam penelitiannya mengatakan bahwa inflasi dapat lebih rendah terjadi pada negara yang lebih terbuka. Menurut hipotesis ini, Bank Sentral Indonesia memiliki insentif yang lebih kecil untuk inflasi yang mengejutkan dalam ekonomi yang lebih terbuka karena kurva Phillips lebih curam. Penelitian ini juga memperkirakan hubungan antara globalisasi ekonomi sebagai salah satu dimensi dari indeks globalisasi KOF baru dan inflasi.

Dalam penelitiannya hasil estimasi mengenai ukuran keterbukaan perdagangan menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara keterbukaan perdagangan dengan inflasi yang menentang hipotesis dari Romer (1993). Penelitian ini menggunakan dua proxy untuk langkah-langkah keterbukaan perdagangan: ukuran tradisional keterbukaan perdagangan dan ukuran lebih luas dari globalisasi ekonomi (indeks KOF). Di satu sisi, hasil estimasi untuk ukuran tradisional untuk dua kelompok negara dan dua periode menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara keterbukaan perdagangan dan inflasi.

C. Kerangka Teoritik

Inflasi merupakan suatu peristiwa ekonomi dimana terjadi kenaikan harga barang-barang umum dan terus menerus. Untuk mengatasi inflasi pemerintah mempunyai 2

kebijakan utama dalam mengatasi masalah ekonomi makro tersebut, yaitu dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

Unsur yang sangat penting dalam setiap kebijakan yaitu kredibilitas dari langkah kebijakan tersebut di mata publik. Suatu langkah kebijakan mempunyai kredibilitas tinggi apabila masyarakat menganggap bahwa tindakan tersebut akan dilaksanakan secara berkomitmen, sehingga masyarakat akan bereaksi seperti apa yang diharapkan oleh kebijakan tersebut. Serta bagaimana realisasi dari setiap kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah apakah kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak sesuai.

Jika pemerintah berkata satu hal dan berbuat hal lain, maka ia akan segera kehilangan kepercayaan pelaku ekonomi dan kredibilitas pemerintah akan rusak⁴⁴, dengan begitu kebijakan yang kehilangan kredibilitasnya tidak akan pernah efektif untuk dijalankan.

Dalam masalah makroekonomi khususnya inflasi, kredibilitas dari kebijakan moneter telah menjadi sorotan dalam menstabilkan harga. Tetapi pada kenyataannya kebijakan fiskal juga berperan dalam penyelesaian masalah ekonomi tersebut, seperti dalam penyusunan anggaran pemerintah apakah terjadi anggaran surplus, seimbang atau defisit. Apabila kredibilitas suatu kebijakan fiskal baik maka akan mampu menurunkan inflasi, sehingga kredibilitas memiliki pengaruh penting pada efektifitas kebijakan fiskal⁴⁵.

Dalam pandangan klasik mengatakan bahwa kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan *aggregate demand* justru akan menaikkan inflasi⁴⁶. Pandangan ini sejalan

⁴⁴ Heru Subianto & Singgih Riphart, *Kebijakan Fiskal : Pemikiran, konsep dan implementasi*, (Jakarta : Kompas, 2004), p. 341

⁴⁵ Hsiao Chink Tang, Philip Liu, Eddie C. Cheung, *op.cit*, p.7

⁴⁶ Samuelson.Nordhaus, *Ilmu Makroekonomi*. (Jakarta : media global edukasi, 2012), p. 237

dengan pandangan Keynes, yang mengatakan bahwa permintaan agregat yang rendah bertanggung jawab terhadap rendahnya pendapatan, tingginya pengangguran dan rendahnya inflasi⁴⁷. Model analisis dari teori Keynes sering dikenal sebagai model IS-LM.

Dalam pasar barang (kurva IS) Keynesian percaya bahwa pemerintah dapat mempengaruhi aktifitas perekonomian nyata dengan mengambil langkah fiskal untuk merubah permintaan agregat tersebut. Ketika terjadi defisit anggaran maka akan meningkatkan pengeluaran pemerintah yang menyebabkan kenaikan pada pendapatan masyarakat dan suku bunga sehingga kurva IS bergeser ke kanan. Kenaikan pendapatan masyarakat tersebut akan menaikkan output yang menggeser kurva *aggregate demand* ke kanan atas dan berdampak pada kenaikan harga akibat permintaan yang berlebih namun barang yang ditawarkan tidak bertambah. Masalah inflasi menurut Keynes adalah pengeluaran yang tidak terkendali sehingga diperlukan kebijakan fiskal untuk mengatasi pengeluaran tersebut⁴⁸.

Kebijakan fiskal terdiri dari tiga jenis yaitu kebijakan berdasarkan aturan, kebijakan penstabil otomatis dan kebijakan diskresioner. Di Indonesia, sejak tahun 2004 Indonesia telah menerapkan aturan kebijakan fiskal berdasarkan nilai defisit dan utang (maksimal masing-masing 3 dan 60 persen dari PDB).⁴⁹

Perekonomian setelah krisis tahun 1998, mengalami defisit anggaran yang tinggi sehingga pemerintah melakukan pencetakan uang, namun saat ini pencetakan uang untuk menutupi defisit dilarang karena akan menambah jumlah uang beredar dan berdampak

⁴⁷ Gregory.Mankiw, *Makroekonomi*, (New York : Worth Publisher, 2007), p.272

⁴⁸ Richard G Lipsey, Peter O Steiner, Douglas D Purvis. *Pengantar Makroekonomi* . (Jakarta: Erlangga, 1991), P.121

⁴⁹ Haryo Kuncoro, *Does The Credible Fiscal Policy Reduce ItsVolatility? The Case of Indonesia*, op. cit, p. 383

pada kenaikan inflasi yang tinggi, sehingga untuk menutup defisit pemerintah menambah utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Dalam paradigma klasik (Neo Klasik) ketika belanja pemerintah naik maka akan terjadi kenaikan defisit anggaran, sehingga defisit anggaran dibiayai dengan utang publik, diikuti dengan kenaikan suku bunga yang mengakibatkan penurunan investasi dan berdampak pada penurunan output dan juga penurunan perekonomian (*Crowding-out*).

Oleh karena itu diperlukan peran kebijakan berdasarkan aturan, menurut paradigma Keynes (Keynesian) tingginya pengeluaran pemerintah akan meningkatkan defisit anggaran, sehingga pemerintah melakukan utang publik untuk menutup defisit anggaran tersebut dengan alternatif di sektor privat dan sektor publik seperti menjual surat utang, sehingga terjadinya kelangkaan dalam surat utang yang mengakibatkan kenaikan pada suku bunga sehingga dana susah di dapat karena adanya kelangkaan yang tinggi, dengan begitu setiap orang akan memanfaatkan kelangkaan dana dengan optimal.

Kenaikan suku bunga akan menurunkan investasi, namun dengan adanya kredibilitas maka Keynes mengatakan terjadi kenaikan kualitas investasi, dimana penggunaan dana investasi digunakan dengan sebaik-baiknya atau optimal, sehingga permintaan akan barang juga stabil dan berdampak pada kestabilan harga. Paradigma Keynesian menekankan bahwa aturan fiskal diperlukan terutama bertujuan untuk menstabilkan fluktuasi makroekonomi (Marneffe et al, 2011.)⁵⁰. Dan paradigma Keynes juga berpendapat bahwa batasan-batasan dalam aturan fiskal diperlukan untuk menghindari dampak *crowding-out*.

⁵⁰ Ibid, p.383

Dengan aturan kebijakan fiskal tersebut utang digunakan sebaik mungkin untuk menutup defisit anggaran sehingga dengan kebijakan yang berkomitmen dalam utang yang direncanakan dengan utang sesungguhnya, maka pemerintah mendapatkan kepercayaan dari pelaku ekonomi dan dapat mengurangi inflasi, dengan demikian disinilah peran penting kebijakan fiskal yang berdasarkan pada aturan. Dengan adanya aturan defisit dan aturan utang maka diharapkan defisit dan utang yang direncanakan tidak menyimpang jauh dari yang sesungguhnya. Untuk itu dibutuhkan kebijakan fiskal yang dilakukan secara berkomitmen dan pengelolaan utang yang bersifat hati-hati⁵¹.

Selain kebijakan fiskal berdasarkan aturan, kebijakan fiskal diskresioner juga berdampak pada kestabilan inflasi. Kebijakan fiskal diskresioner didefinisikan sebagai perubahan atau reaksi kebijakan fiskal yang mencerminkan reaksi terhadap kondisi ekonomi yang dihadapi (Fatas & Mihov, 2003)⁵². Pada saat belanja pemerintah tinggi kebijakan dengan menaikkan pajak dapat meningkatkan tabungan nasional karena lebih cenderung untuk menabung daripada mengkonsumsi barang. Pajak merupakan salah satu kebijakan fiskal diskresioner yang diharapkan mampu menurunkan permintaan agregat.

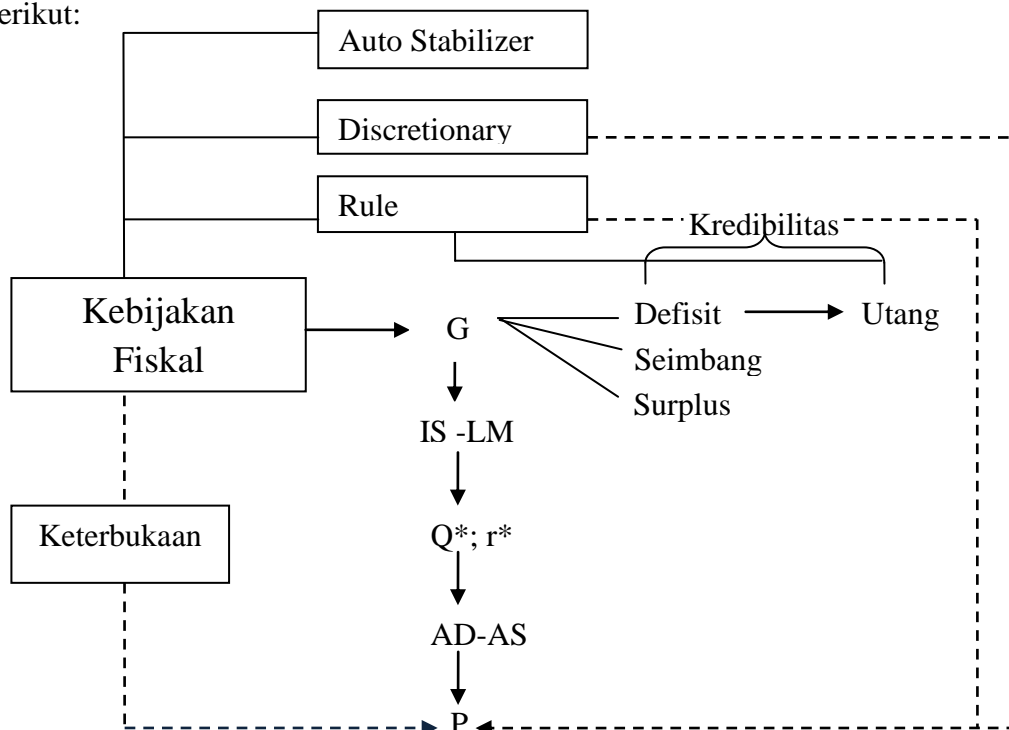
Dalam paradigma Ricardian kenaikan defisit anggaran menaikkan utang, namun masyarakat sudah mengetahui bahwa akan terjadi kenaikan pajak sehingga masyarakat menaikkan tabungan dari pada mengkonsumsi suatu barang sehingga output dan investasi tetap dan harga stabil. Dalam penelitian ini bukan hanya melihat kebijakan berdasarkan aturan dan diskresioner saja, tetapi juga melihat keterbukaan ekonomi yang memiliki dampak bagi inflasi.

⁵¹ Heriberta, *Inflasi dan pembiayaan pengeluaran pemerintah suatu analisis dan aplikasi di Indonesia*, (Jurnal manajemen pembangunan, Juli 1997), p.76

⁵² Ndari Surjaningsih., Diah Utari., Dan Budi Tristanto., Op.Cit. p.398

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dibuat kerangka konseptual sebagai

berikut:



D. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoretik di atas maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Kredibilitas aturan defisit diduga memiliki dampak negatif terhadap inflasi di Indonesia, dimana makin kredibel aturan defisit maka makin rendah tingkat inflasi yang terjadi.
2. Kredibilitas aturan utang diduga memiliki dampak negatif terhadap inflasi di Indonesia, dimana makin kredibel aturan utang maka semakin rendah pula tingkat inflasi yang terjadi.

3. Diskresioner diduga memiliki dampak negatif terhadap inflasi di Indonesia, dimana semakin tinggi diskresioner yang ada maka makin rendah inflasi yang terjadi karena diskresioner dapat meredam inflasi yang tak terduga.
4. Keterbukaan ekonomi diduga memiliki dampak positif terhadap inflasi di Indonesia, dimana semakin tinggi keterbukaan ekonomi maka semakin tinggi juga inflasi yang akan terjadi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti rumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data empiris dan fakta-fakta yang sah, benar, valid, dan dapat di percaya serta dapat diandalkan dari masalah yang diajukan mengenai dampak kredibilitas kebijakan fiskal yang dilihat dari sisi aturan defisit, aturan utang, diskresioner dan keterbukaan ekonomi terhadap inflasi di Indonesia.

B. Objek dan Ruang Lingkup penelitian

Objek yang diambil pada penelitian ini adalah Indonesia. Adapun alasan peneliti menggunakan objek penelitian tersebut, karena data yang disajikan cukup lengkap sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan proses pengumpulan data. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah inflasi, kredibilitas fiskal dalam aturan defisit, kredibilitas fiskal dalam aturan utang, diskresioner dan keterbukaan ekonomi pada tahun 2001 (Q1) sampai dengan 2013 (Q4), dengan total pengamatan secara operasional adalah 52 data.

C. Metode Penelitian

1. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ekspos fakto. Metode ekspos fakto adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang

sudah terjadi. Kemudian meruntut kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder.

Sebagaimana dicatat oleh Naert dan Goeminne dalam menilai kualitas, perkiraan dapat dilakukan dengan menggunakan banyak teknik⁵³. Untuk hasil awal pertama, kami memilih untuk memberikan indikasi kualitatif akurasi perkiraan dengan menghadirkan beberapa statistik deskriptif dan metode seperti ini memiliki keuntungan yaitu mudah.

Dalam tulisan ini, kita mengasumsikan bahwa proyeksi anggaran harus dianggap sebagai pengumuman dari target politik. Analog Annett dan Pina serta Venes menyatakan bahwa kredibilitas kebijakan fiskal (E_t) diukur sebagai selisih antara saldo anggaran yang sebenarnya pada tahun t (A_t), dan target yang terbaru untuk keseimbangan anggaran untuk tahun t dalam $t-1$ (P_t), atau dengan demikian⁵⁴:

$$E_t = A_t - P_t \quad (1)$$

Nilai positif E_t memiliki arti bahwa nilai realisasi fiskal yang lebih tinggi dari pada nilai anggaran yang telah direncanakan, sehingga akan menghasilkan surplus yang lebih besar atau defisit yang lebih kecil. Nilai yang negatif mengindikasikan hasil yang dicapai pemerintah lebih kecil dari proyeksi hal ini dapat disebabkan karena pemerintah terlalu optimistis, underestimasi terhadap defisit, atau overestimasi terhadap surplus.

Dengan logika yang sama atas (1), indeks kredibilitas kebijakan fiskal (CI) dapat dibangun sebagai berikut:

$$CI = \frac{A_t}{P_t} \times 100 \% \quad (2)$$

⁵³ Naert,F, *Credibility of Fiscal Policies and independent Fiscal Bodies*, (Review of business and economic literature, 2011), p.288-309

⁵⁴ Haryo,Kuncoro. Op,cit. p.144

Berdasarkan formula (2) ini, akurasi kebijakan fiskal ditunjukkan dengan skor 100 persen. Jika realisasi anggaran yang kurang dari apa yang telah ditargetkan sebelumnya, indeks kredibilitas akan menunjukkan kurang dari 100 persen. Sementara itu, jika realisasi anggaran melebihi angka proyeksi, maka indeks akan lebih besar dari 100 persen.

Metode di atas hanya berdasarkan pada anggaran yang telah direncanakan yang biasanya sudah ditentukan pada tahun sebelumnya. Namun pada kenyataannya, sebenarnya ada banyak penyesuaian pada periode berjalan seperti adanya perubahan anggaran pada pertengahan tahun yang sedang berjalan. Untuk menampung penyesuaian tersebut, maka perkiraan anggaran yang sebenarnya didekati dengan menggunakan variabel kunci ekonomi makro dalam hal ini adalah inflasi.

Sebuah model regresi yang telah menghubungkan dua variabel diatas perlu dibangun. Mengikuti metodologi yang telah digunakan oleh Akitoby *et al* yang diasumsikan adanya hubungan jangka panjang antara besaran fiskal yang aktual (F) dengan variabel kunci ekonomi makro dan yang paling penting yaitu kebijakan fiskal yang berada ditangan pemerintah adalah konsumsi dari pemerintah. Dan hal ini akan bermanfaat untuk melihat bagaimana perubahan dampak konsumsi pemerintah dalam hasil akhir perekonomian. Setelah metodologi yang digunakan oleh Akitoby *et al*⁵⁵. Kami kira ada keadaan stabil yang berhubungan antara pengeluaran pemerintah dan output yang diberikan :

$$G = A Y^{\delta} \tag{3}$$

⁵⁵ Haryo.Kuncoro, Log.cit.

Dimana G di atas merupakan pengeluaran pemerintah dan Y berarti output. Persamaan (3) ini juga dapat ditulis dalam bentuk perbedaan logaritmik-linear yaitu:

$$\Delta \text{Log } G_t = a + \delta \Delta \text{Log } Y_t + \varepsilon_t \quad (4)$$

Dimana Δ adalah suatu operator perbedaan, $a = \log(A)$ dan δ adalah parameter yang akan diestimasi, dan ε adalah istilah gangguan sistematis (error). Setelah Fatas dan Mihov serta Afonso et al⁵⁶, persamaan (4) dapat ditambahkan oleh variabel tertinggal untuk mengakomodasi persistens.

$$\Delta \text{Log } G_t = a + \delta \Delta \text{Log } Y_t + \rho \Delta \text{Log } G_{t-1} + \varepsilon_t; \quad |\rho| < 1 \quad (5)$$

Dimana P menunjukkan suatu tingkat persistensi dan $(1-P)$ adalah koefisien penyesuaian parsial. Derivasi diatas menjelaskan asumsi yang mendasari bahwa ada hubungan elastisitas antara keduanya, sedangkan penyimpangan sementara yang random (ε). Koefisien δ juga merupakan fungsi reaksi kebijakan fiskal sehubungan dengan siklus bisnis.

Mengikuti Aizenman dan Marion, bahwa efek tak terduga dari kebijakan fiskal dapat dihitung dengan cara pas proses autoregressive orde pertama dan P yang terbaik diperkirakan dengan menghilangkan variabel output sehingga di dapat:

$$\Delta \text{Log } G_t = a + \rho \Delta \text{Log } G_{t-1} + \varepsilon_t \quad (6)$$

Menurut Fatas dan Mohov istilah ε adalah perkiraan kuantitatif shock dari kebijakan diskresioner yang dikeluarkan oleh pemerintah⁵⁷.

$$Z3 = \varepsilon \quad (7)$$

⁵⁶ Haryo.Kuncoro, Log.Cit.

⁵⁷ Fatas, A. and Mihov, I, 2013, "The Case For Restricting Fiscal Policy Discretion", Quaterly Journal of Economics, 118 (4) : 1419, pp.47

Defisit anggaran adalah perbedaan antara pengeluaran pemerintah akhir dengan penerimaan pemerintah. Hal ini berlaku untuk aktual (subscript A) dan untuk anggaran yang direncanakan (subscript P):

$$\text{Def}_A = \text{Rev}_A - \text{Exp}_A \quad (8)$$

$$\text{Def}_P = \text{Rev}_P - \text{Exp}_P \quad (9)$$

Singkatnya, kebijakan fiskal dikatakan kredibel jika ada sedikit perbedaan antara kebijakan fiskal aktual dan diproyeksikan (nært, 2011). Oleh karena itu, rasio defisit sebenarnya defisit direncanakan mewakili kredibilitas kebijakan defisit.

$$Z1 = \text{Def}_A : \text{Def}_P \quad (10)$$

Ketepatan pada kebijakan aturan defisit akan ditunjukkan dengan nilai skor 1. Jika realisasi defisit anggaran pada periode saat ini kurang dari apa yang telah ditargetkan sebelumnya, indeks defisit anggaran kredibilitas akan menunjukkan kurang dari 1. Sedangkan jika defisit anggaran realisasi melebihi angka proyeksi, indeks akan lebih dari 1.

Ide yang sama juga diterapkan untuk kredibilitas aturan utang karena utang merupakan warisan defisit masa lalu. Akan tetapi sayangnya, aliran atau stok utang yang direncanakan untuk setiap tahun di Indonesia tidak tersedia. Oleh karena itu, peneliti memperkirakan tingkat utang yang direncanakan akan diproyeksikan menggunakan prosedur penyaring AR. Perbedaan antara stok utang aktual dan tingkat stok utang diproyeksikan menunjukkan kredibilitas kebijakan aturan utang.

$$Z2 = \text{Debt}_A : (\text{Debt}_P)_{AR} \quad (11)$$

Akhirnya, kita dapat membangun model pertumbuhan ekonomi yang merupakan fungsi dari aturan defisit kredibilitas (Z1), aturan utang kredibilitas (Z2), diskresioner (Z3) dan variabel kontrol lainnya (X):

$$\text{Inflasi} = \theta + \phi_1 Z1 + \phi_2 Z2 + \phi_3 Z3 + \phi_i X_i + \xi_t \quad (12)$$

Faktor X meliputi keterbukaan ekonomi, variabel dummy dalam *Inflation Targeting* (IT) pada tahun 2005. Tingkat keterbukaan ekonomi dihitung dari persamaan berikut:

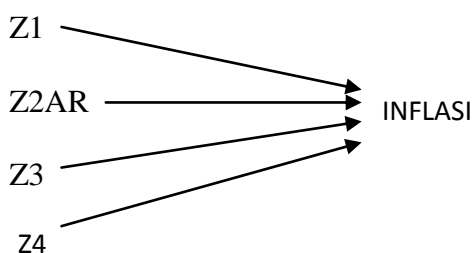
$$\text{Openness} = (\text{EX} + \text{IM}) : Y \quad (13)$$

di mana EX adalah ekspor dan IM adalah nilai impor masing-masing.

$$\text{Inflasi} = a + bZ1 + cZ2AR + dZ3 + eZ4 + e \quad (14)$$

Dimana a adalah sebagai nilai konstanta, lalu untuk Z1 adalah aturan defisit, Z2 adalah aturan utang, Z2 yang di gunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan penyaring AR dan Z3 adalah sebagai kebijakan diskresioner dan Z4 adalah keterbukaan ekonomi.

2. Konstelasi Hubungan antar Variabel



Keterangan :

Z1 : Kredibilitas aturan defisit

Z2AR : Kredibilitas aturan utang

Z3 : Diskresioner

Z4 : Openness (Ekspor dan Impor)

—————→ : Arah Hubungan

D. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan periode sampel yang dipilih adalah dari tahun 2001 (Q1) hingga 2013 (Q4). Fatas dan Mihov menyatakan bahwa variabel ini adalah variabel makro yang dibutuhkan untuk mempelajari dampak kebijakan fiskal. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan diantaranya berupa data Inflasi diambil dari BPS (Badan Pusat Statistik) dalam bentuk kuartal.

Kemudian pengeluaran pemerintah merupakan total pengeluaran pemerintah yang tidak termasuk pembayaran bunga. Rencana pengeluaran pemerintah dikompilasi dari nota keuangan yang telah disusun pada setiap tahun anggaran. Data defisit anggaran peneliti ambil dari data penerimaan dan pengeluaran pemerintah (BI SEKI). Sementara untuk data total utang (Penjumlahan utang dalam dan luar negeri) dalam mata uang domestik berasal dari pengelolaan utang office (www.djpu.kemenkeu.go.id). Data yang digunakan berbentuk kuartalan namun terdapat beberapa data yang tersedia dalam bentuk tahunan akan dilakukan interpolasi secara linier agar sesuai dengan data kuartal lainnya.

E. Operasionalisasi variabel penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Dampak kredibilitas kebijakan fiskal terhadap inflasi di Indonesia”. Maka terdapat beberapa variabel diantaranya yaitu :

1. Inflasi

a. Definisi konseptual

Inflasi adalah kenaikan harga – harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam waktu panjang dan berdampak dalam jangka panjang. Jadi ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi yaitu tingkat kenaikan harga yang terjadi pada barang dan jasa, bersifat umum (artinya tidak hanya dalam satu atau dua barang saja) dan berlangsung secara terus menerus (artinya tidak hanya dalam jangka waktu yang pendek tetapi dalam jangka panjang).

b. Definisi Operasional

Data inflasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Indeks Harga Konsumen. Data inflasi dihitung dalam *month to month* yang berarti inflasi dihitung dari bulan sebelumnya.

$$\text{inflasi} : ((\text{IHK}_n - \text{IHK}_{n-1}) / \text{IHK}_{n-1}) * 100$$

IHK_n = Indeks Harga Konsumen pada bulan tertentu (n)

IHK_{n-1} = Indeks Harga Konsumen pada bulan sebelumnya (n-1)

2. Kredibilitas Kebijakan Fiskal

a. Definisi Konseptual

Kredibilitas kebijakan fiskal adalah tingkat kepercayaan dari pelaku ekonomi terhadap kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah dalam anggaran pendapatan dan pengeluaran negara meliputi anggaran belanja defisit, utang pemerintah, diskresioner dan keterbukaan untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi seperti

inflasi. Penetapan kebijakan tersebut menggunakan target yang ditetapkan dalam waktu sekarang untuk masa depan dengan melihat besaran aktual dengan yang direncanakan.

b. Definisi Operasional

Kredibilitas kebijakan fiskal dapat diukur secara kuantitatif dengan melihat aturan defisit, aturan utang, diskresioner, dan *openness*.

Kredibilitas Aturan Defisit

Defisit anggaran diperoleh dari selisih antara pengeluaran pemerintah dengan penerimaan pemerintah. Hal ini berlaku untuk aktual (subscript A) dan untuk anggaran yang direncanakan (subscript P):

$$\text{Def}_A = \text{Rev}_A - \text{Exp}_A$$

$$\text{Def}_P = \text{Rev}_P - \text{Exp}_P$$

Kebijakan fiskal dikatakan kredibel jika ada sedikit perbedaan antara kebijakan fiskal aktual dan diproyeksikan. Oleh karena itu, rasio defisit sebenarnya dengan defisit direncanakan mewakili kredibilitas kebijakan defisit.

$$Z1 = \text{Def}_A : \text{Def}_P$$

Ketepatan kebijakan aturan defisit ditunjukkan dengan skor 1. Jika realisasi defisit anggaran pada periode saat ini kurang dari apa yang telah ditargetkan sebelumnya, indeks defisit anggaran kredibilitas akan menunjukkan jauh dari angka 1. Sedangkan jika defisit anggaran realisasi melebihi angka proyeksi, indeks akan mendekati angka 1.

Kredibilitas Aturan Utang

Aturan utang dapat diperoleh dengan mengkalkulasikan model auto-regresif derajat pertama untuk efek kebijakan fiskal yang tidak dapat terantisipasi dan P merupakan

estimasi terbaik bagi proyeksi variabel fiskal dengan menghilangkan variabel output sedemikian rupa sehingga

$$\text{Log } F_t = a + P \text{ Log } F_{t-1} + \varepsilon_t$$

$$\text{AR} = \varepsilon_t = \text{Log } F_t : (a + P \text{ Log } F_{t-1})$$

Aturan utang juga dilihat dari utang yang direncanakan dengan utang sesungguhnya. Namun sayangnya, aliran atau stok utang yang direncanakan untuk setiap tahun di Indonesia tidak tersedia. Oleh karena itu, tingkat utang diproyeksikan menggunakan prosedur penyaring AR. Perbedaan antara stok utang aktual dan tingkat stok utang diproyeksikan menunjukkan kredibilitas kebijakan aturan utang.

$$Z2 = \text{Debt}_A : (\text{Debt}_P)_{\text{AR}}$$

Diskresioner

Diskresioner dapat diperoleh dari efek yang tak terduga dalam kebijakan fiskal (anggaran penerimaan dan pengeluaran), sehingga dapat dihitung dengan pas proses autoregressive orde pertama dan ρ yang terbaik diperkirakan dengan menghilangkan variabel output sehingga di dapat:

$$\Delta \text{ Log } G_t = a + \rho \Delta \text{ Log } G_{t-1} + \varepsilon_t$$

Menurut Fatas dan Mihov istilah ε adalah perkiraan kuantitatif *shock* dari kebijakan diskresioner yang dikeluarkan oleh pemerintah⁵⁸. Mengacu pada penelitian tersebut dengan mengukur kebijakan diskresioner menjadi komponen sistematis yang diukur dengan standar deviasi (SD) dari kebijakan fiskal diskresioner selama tahun 2001 – 2014 dalam empat kuartal berturut-turut.

$$Z3 = \varepsilon$$

⁵⁸ Fatas, A. and Mihov, I, 2013, "The Case For Restricting Fiscal Policy Discretion", (Quarterly Journal of Economics, 118 (4) : 1419), pp.47

Keterbukaan Ekonomi

Keterbukaan ekonomi dalam penelitian ini dilihat dari sektor riil dengan melihat jumlah ekspor dan impor. Keterbukaan ekonomi ini diperoleh dari data jumlah ekspor dan impor yang di dapat dari Bank Indonesia dan dibandingkan dengan pendapatan nasional.

Openness : $((EX+IM) : Y)$.

Dimana Ex adalah ekspor, Im adalah impor dan Y adalah pendapatan nasional.

F. Teknik analisis data

1. Uji Linieritas

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak benar. Regresi linier di bangun berdasarkan asumsi bahwa variabel – variabel yang dianalisis memiliki hubungan linier. Strategi untuk memverifikasi hubungan linier tersebut dapat dilakukan dengan table anova.

2. Persamaan Regresi Linier Berganda

Menggunakan rumus Regresi Linear ganda yaitu untuk mengetahui pengaruh secara kuantitatif adanya konvergensi kondisional dari Aturan Defisit (X1), Aturan utang (X2), Diskresioner (X3) dan Keterbukaan (X4) terhadap Inflasi (Y). Fungsinya dinyatakan dalam persamaan berikut ini :

$$\text{Inflasi} = a + b_1Z_1 + b_2Z_2 + b_3Z_3 + b_4Z_4 + e$$

Keterangan :

Z1 : Kredibilitas aturan defisit

Z2 : Kredibilitas aturan utang

Z3 : Diskresioner

Z4 : Openness

a : Konstanta

e : Eror

- $H_0 : Z1, Z2AR, Z3 \text{ dan } Z4 = 0$
- $H_a : Z1, Z2AR, Z3 \text{ dan } Z4 \neq 0$

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menunjukkan proporsi variabel terikat (Inflasi) yang dapat dijelaskan oleh variasi bebas (Kredibilitas kebijakan fiskal dalam aturan defisit, utang, diskresi dan *openness*). Nilai R^2 adalah suatu ukuran kesesuaian model (*model fit*). Dengan perkataan lain, seberapa baik hubungan yang diestimasi (secara linier) telah mencerminkan pola data yang sebenarnya.⁵⁹

Koefisien Determinasi memiliki hubungan yang erat dengan korelasi namun memiliki konsep yang berbeda, Besar R^2 dapat juga dihitung dengan ;

$$R^2$$

Keterangan :

R = koefisien determinasi

⁵⁹ Moch.Doddy Ariefianto, *op. cit.*, p. 25

Atau dapat dijabarkan dalam;⁶⁰

$$R^2 = \left| \frac{N \sum X_t Y - (\sum X_t) (\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X_t^2 - (\sum X_t)^2] [N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}} \right|^2$$

4. Uji t

Selanjutnya dalam menguji apakah parameter yang diperoleh adalah signifikan secara statistik, maka dilakukan uji T. Pengujian ini dapat dilakukan untuk melihat apakah nilai estimate adalah sama atau tidak dengan nilai tertentu atau satu arah (*one way*) lebih besar atau lebih kecil dari nilai tertentu.

Formula uji T sebagai berikut ;

$$t = \frac{\hat{\beta}_i}{se(\hat{\beta}_i)}$$

Keterangan:

$\hat{\beta}$ = koefisien regresi

i = (1,2,3)

$se(\hat{\beta})$ = standar deviasi sampling (*standar error*)

Nilai t yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan nilai kritis yang berlaku sesuai dengan derajat bebas dan tingkat signifikansi (*level of significance; α*) yang disesuaikan dengan tabel, setelah dihitung maka diperoleh nilai t-tabel (0,05;47) sebesar 2,0117. Apabila nilai statistik uji melebihi nilai kritis maka hipotesis null akan ditolak, dan sebaliknya (hipotesis null tidak dapat ditolak) jika nilai statistik uji lebih kecil dari nilai kritis.

⁶⁰ Domar Gujarati, *op. cit.*, p. 139

5. Uji F

Pengujian pada sekelompok variabel bebas memiliki atau tidak memiliki dampak terhadap variabel terikat, dengan mengontrol dampak suatu set variabel bebas yang lain. Pengujian ini disebut dengan pengujian hipotesis berganda. Asumsi lebih lanjut bahwa variabel yang direstriksi ini dapat diformulasikan ;

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

Hipotesis alternative adalah H_0 tidak benar, dengan kata lain paling tidak ada satu koefisien yang secara statistik adalah signifikan. Dengan melihat taraf signifikan 0.05 dapat diperoleh f tabel melalui perhitungan $f(0.05,4,47)$ diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 2.5695. Pada pengujian ini, F_{hitung} dihitung dapat diperoleh dengan formula sebagai berikut⁶¹;

$$F_{\text{hitung}} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel

n = Jumlah data

6. Uji Klasik

Uji klasik digunakan untuk mengetahui apa yang terjadi pada sifat – sifat penaksir *Ordinary Least Squares* (OLS), apakah satu atau lebih dari asumsi klasik dapat dipenuhi

⁶¹ Moch. Doddy Ariefianto, *op. cit.*, p. 21-22

atau tidak dapat dipenuhi. Jika asumsi ini dipenuhi, maka parameter yang diperoleh dengan OLS adalah bersifat *Best Linier UnBiased Estimator* (BLUE).

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dengan analisis grafis dan uji statistik. Dengan analisis grafik dapat melihat dalam P-Plot menggunakan SPSS dan dengan uji statistik dengan syarat ketentuan Porbabilitas > 0.05 atau Jarque-Bera $< \text{Chi Square}$ (Jarque-Bera < 67.05).

Pada penelitian ini, uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji Jarque-Bera (JB). Karena uji normalitas dengan menggunakan uji Jarque-bera akan menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan uji normalitas lain. Rumus uji Jarque-Bera yaitu.⁶²

$$JB = \frac{s^2}{6} + \frac{(k-3)^2}{24}$$

Keterangan :

JB : Jarque-Bera

S : Skewness (kemencengan)

K : Kurtosis (keruncingan)

Hipotesis:

Ho : error berdistribusi normal

Ha : error tidak berdistribusi normal.

⁶² Sofyan Yamin, Lien A. Ravhmach dan Heri Kurniawan. *Regresi dan Korelasi dalam Genggaman Anda*. (Jakarta: Salemba Empat), p.25

b. Autokorelasi

Autokorelasi menunjukkan sifat residual regresi yang tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Autokorelasi timbul dari spesifikasi yang tidak tepat terhadap hubungan antara variabel endogenous dengan variabel penjelas. Akibat kurang memadainya spesifikasi maka dampak factor yang tidak termasuk ke dalam model terlihat pada pola residual⁶³. Syarat dapat dikatakan tidak terdapat autokorelasi dapat dilihat dari Probabilitas Chi Square > 0.05 .

Selain itu juga dapat dilihat dengan Statistik Durbin Watson (DW) adalah teknik deteksi autokorelasi yang paling banyak digunakan. Penggunaan statistik ini dilakukan dapat diasumsikan bahwa pola autokorelasi ;

$H_0 : \rho = 0$ (tidak ada autokorelasi)

$H_1 : \rho \neq 0$

Statistik DW diformulasikan sebagai berikut ;

$$DW = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=2}^n e_t^2}$$

Keterangan ;

DW = Nilai Durbin Watson

e_t = nilai residual periode t

e_{t-1} = Nilai Residual periode t-1

Aturan penolakan hipotesis null (*rejection rule*) sebagai berikut ;

$4 - d_l < DW < 4$; *Negative Autocorrelation*

$4 - d_u < DW < 4 - d_l$; *Indeterminate*

⁶³ Moch.Doddy Ariefianto, *op. cit.*, p. 27

$2 < DW < 4 - d_u$; *No Autocorrelation*

$d_l < DW < d_u$; *Indeterminate*

$0 < DW < d_l$; *Positive Autocorrelation*

c. Heterokedastisitas

Varians dari residual tidak berubah dengan berubahnya satu atau lebih variabel bebas. Jika asumsi ini terpenuhi, maka residual disebut homokedastisitas jika sebaliknya disebut heterokedastisitas. Heterokedastisitas menyebabkan standar error dari model regresi menjadi bias dan sebagai kosekuensinya matriks varians – kovarians yang digunakan untuk menghitung standar eror parameter menjadi bias juga.

Generalized Least squares (GLS) merupakan prosedur koreksi heterokedastisitas dengan cara melakukan transformasi dan restimasi. Jika mengetahui bentuk spesifik dari heterokedastisitas, maka dapat dimodifikasi nilai variabel terikat dan variabel bebas sesuai dengan heterokedastisitas dan mengestimasiya kembali. Syarat dapat dikatakan tidak terdapat heterokedastisitas dapat melihat dari Probabilitas *Chi Square* > 0.05

Salah satu bentuk yang paling sering digunakan dalam mengasumsi heterokedastisitas adalah *multiplicative constant*⁶⁴

$$\text{Var}(u|x) = \sigma^2 h(x)$$

Dapat disederhanakan:

$$\sigma_i^2 = \sigma^2 h(x_i) = \sigma^2 h_i$$

Keterangan ;

x = menyatakan seluruh variabel bebas

⁶⁴ Moch. Doddy Ariefianto, *op. cit.*, p. 43

$h(x)$ = Suatu fungsi dari variabel bebas yang menentukan heteroskedastisitas

σ = nilai heteroskedastisitas

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Dalam penelitian ini peneliti mengambil satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi variabel terikat, variabel bebas yang diangkat dalam penelitian ini adalah kredibilitas kebijakan fiskal yang terdiri dari aturan defisit, aturan utang, diskresioner dan keterbukaan ekonomi. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang faktornya diukur serta diamati untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Variabel terikat yang diangkat dalam penelitian ini adalah inflasi.

Kita dapat melihat dampak dari kredibilitas kebijakan fiskal pada inflasi dengan table statistik deskriptif sebagai berikut :

Tabel IV.1 Statistik Deskriptif Kredibilitas Kebijakan Fiskal dan Inflasi

	Y	Z1	Z2AR	Z3	Z4
Mean	0.018912	0.004122	1.000118	1.96E-06	0.549155
Median	0.015800	0.004100	0.999400	0.054200	0.548200
Maximum	0.099700	0.041000	1.044900	0.309900	0.781000
Minimum	0.001600	-0.072300	0.931500	-0.573000	0.437500
Std. Dev.	0.016125	0.015752	0.020867	0.228436	0.067421
Skewness	2.594919	-1.993809	-0.193639	-1.046265	0.661136
Kurtosis	13.37330	12.72973	4.251928	3.440701	4.118211
Jarque-Bera	285.8970	234.9587	3.649280	9.717410	6.372451

	Y	Z1	Z2AR	Z3	Z4
Probability	0.000000	0.000000	0.161276	0.007761	0.041328
Observations	51	51	51	51	51
Simpulan		Tidak Kredibel	Kredibel		

Dari data yang telah dieksekusi dengan menggunakan *Eviews 8* tersebut diketahui bahwa Y adalah inflasi, Z1 adalah aturan defisit, sedangkan untuk Z2 adalah aturan utang dengan menggunakan model Z2AR, kemudian untuk Z3 adalah diskresioner dan untuk Z4 adalah *openness*. Tabel IV.1 menyajikan statistik dasar meliputi mean, median, dan nilai-nilai ekstrim (maksimum dan minimum) untuk variabel yang menarik. Nilai rata-rata inflasi dengan model kebijakan fiskal (Z1, Z2AR, Z3, dan Z4) tidak dekat satu dengan yang lain. Setiap nilai median cukup dekat dengan rata-rata masing-masing (khususnya Z1, Z2AR, dan Z4). Kedekatan median dengan rata-rata nilai awal menunjukkan bahwa semua variabel kepentingan terdistribusi normal yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

Distribusi simetris dari lima variabel dikonfirmasi oleh nilai moderat *Skewness*. *Skewness* mengukur distribusi simetris atau normal yang nilainya diharapkan adalah nol. Nilai-nilai kemiringan untuk variabel Z1, Z2AR dan Z3 yang sedikit lebih rendah dari 0 menunjukkan bahwa seri miring ke kiri. Sebaliknya, nilai kemiringan untuk inflasi, dan Z4 yang lebih besar dari 0 menunjukkan seri yang sesuai miring ke kanan.

Selain itu, inflasi memiliki nilai terbesar dari *kurtosis*. *Kurtosis* mengukur keruncingan atas distribusi dengan nilai yang diharapkan adalah 3,0. Sebagian besar nilai *kurtosis* dari seri lebih dari 3. dan untuk Z1, Z2AR, Z3 dan Z4 memiliki *kurtosis* yang

lebih dari 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi, Z1 (kredibilitas aturan defisit), Z2AR (kredibilitas aturan utang), Z3 (diskresioner) dan Z4 (*openness*) memiliki nilai kurtosis melebihi 3 menyiratkan ekor distribusi yang lebih tebal dari normal (yaitu *leptokurtic*).

1. Inflasi

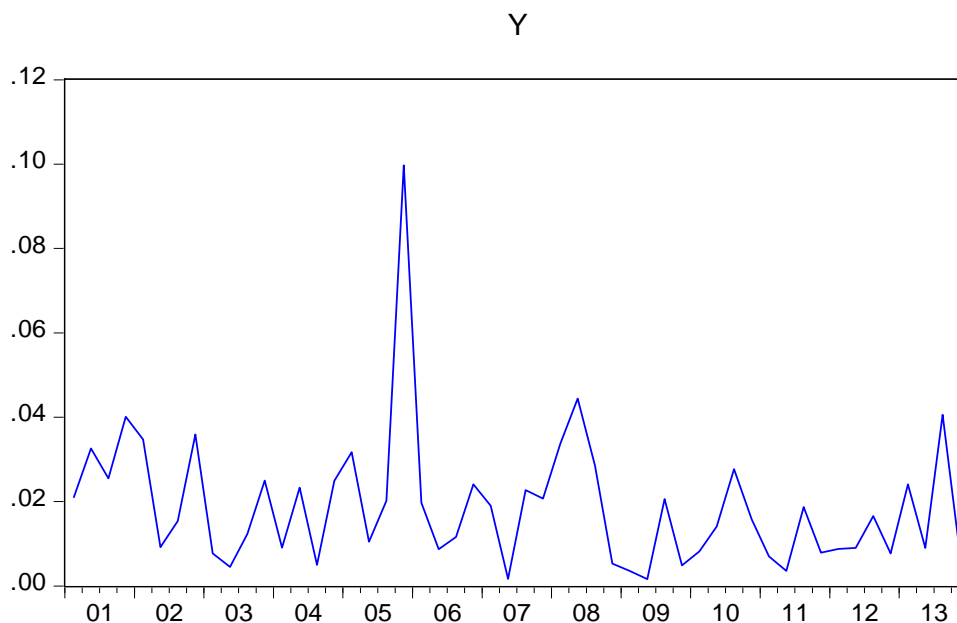
Inflasi merupakan kenaikan harga-harga barang secara umum dan memiliki dampak terhadap barang lainnya, Inflasi biasanya terjadi dalam waktu yang panjang. Data inflasi dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan dijadikan data dalam bentuk kuartalan.

Tabel IV.2 Inflasi tahun 2001-2013

Th	Qt	Inflasi %	Th	Qt	Inflasi %
2001	1	0.0209	2008	1	0.0337
	2	0.0326		2	0.0444
	3	0.0255		3	0.0285
	4	0.0401		4	0.0053
2002	1	0.0347	2009	1	0.0036
	2	0.0092		2	0.0016
	3	0.0164		3	0.0206
	4	0.0359		4	0.0049
2003	1	0.0077	2010	1	0.01
	2	0.0045		2	0.0141
	3	0.0123		3	0.0277
	4	0.025		4	0.0158

Th	Qt	Inflasi %	Th	Qt	Inflasi %
2004	1	0.0091	2011	1	0.007
	2	0.0233		2	0.0036
	3	0.005		3	0.0187
	4	0.0249		4	0.0079
2005	1	0.0317	2012	1	0.0088
	2	0.0105		2	0.009
	3	0.0202		3	0.0166
	4	0.0997		4	0.0077
2006	1	0.0197	2013	1	0.0241
	2	0.0087		2	0.009
	3	0.0116		3	0.0406
	4	0.0241		4	0.0076
2007	1	0.019			
	2	0.0017			
	3	0.0227			
	4	0.0207			

Sumber : Badan Pusat Statistik



Gambar IV.1 Inflasi tahun 2001-2013

Data diperoleh dari data inflasi *Month to Month* yang diambil dari Badan Pusat Statistik periode per tiga bulan (Maret, Juni, September dan Desember). Data inflasi yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2001 hingga 2013 dalam kuartalan. Sehingga total data keseluruhan berjumlah 51 data.

Gambar IV.1 Dalam grafik di atas menjelaskan bahwa inflasi yang terjadi di Indonesia dari tahun 2001-2004 mengalami fluktuatif hingga pada tahun 2005 terjadi peningkatan yang sangat tajam, hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga minyak dunia sehingga pemerintah Indonesia meningkatkan juga harga bahan bakar minyak di dalam negeri yang mengakibatkan juga kenaikan pada harga secara umum.

Kemudian inflasi mengalami penurunan kembali di tahun 2006 dan tahun 2007, namun pada tahun 2008 terjadi lagi peningkatan inflasi yang tidak melebihi tahun 2005, hal ini dikarenakan krisis finansial global dan krisis pangan yang melanda dunia pada tahun 2007 akhir, akibat adanya kesulitan likuiditas dan kenaikan harga komoditi primer.

Kemudian setelah dikendalikan pada tahun 2009 tingkat inflasi dapat turun kembali dan menurun kembali pada kuartal berikutnya. Hingga pada tahun 2010 hingga 2013 inflasi mengalami naik turun secara fluktuatif namun masih dikategorikan inflasi rendah.

2. Kredibilitas Kebijakan Fiskal

Kredibilitas kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan sisi pengeluaran pemerintah ataupun sisi pendapatan pemerintah. Dilihat dari jenis kebijakan fiskal dalam aturan defisit pada belanja pemerintah, aturan utang pemerintah, diskresioner dan keterbukaan ekonomi yang dilihat dari sektor riil. Penetapan tersebut menggunakan target yang ditetapkan dalam waktu saat ini untuk waktu yang akan datang, dengan melihat besaran aktual dengan besaran yang direncanakan.

Tabel IV.3 Perencanaan dan Realisasi APBN Tahun 2001-2013 (Milyar Rp)

Tahun	Bugdet APBN (Surplus/Defisit)	Realisasi APBN (Surplus/Defisit)
2001	-54.727	-40.485
2002	-40.454	-23.652
2003	-34.436	-35.109
2004	10.536	-23.810
2005	-24.344	-14.408
2006	-39.984	-29.142
2007	-58.285	-49.844
2008	-34.503	-4.121
Tahun	Bugdet APBN	Realisasi APBN

	(Surplus/Defisit)	(Surplus/Defisit)
2009	-129.845	-88.619
2010	-133.748	-46.846
2011	-150.837	-84.400
2012	-190.105	-153.301
2013	-224.186	-211.937

Sumber : *Bank Indonesia*

Tabel IV.3 diatas adalah perencanaan dan realisasi APBN yang diambil dari data pembiayaan pemerintah dari tahun 2001-2013. Data tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2001 hingga tahun 2013 realisasi APBN mengalami defisit, dan ratio defisit yang paling besar terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 8,3.

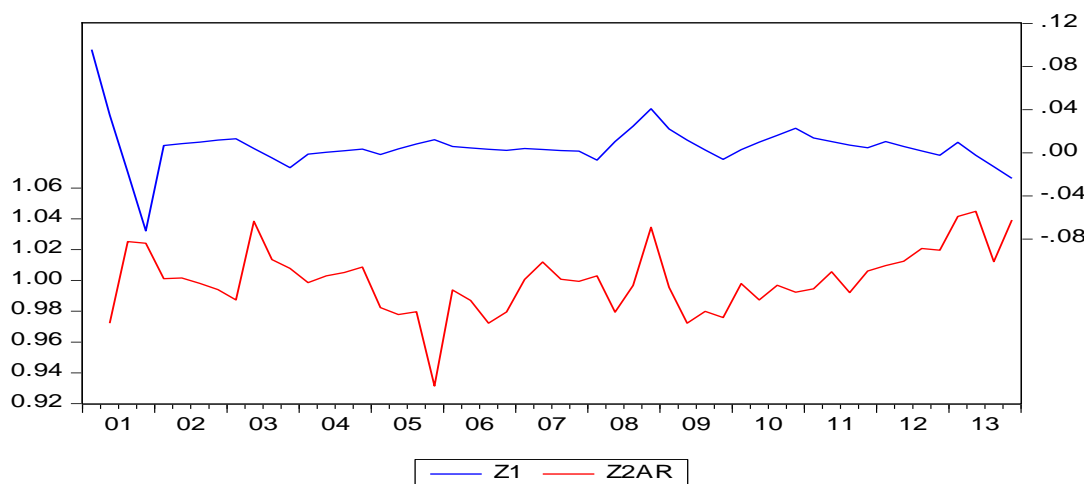
Tabel IV.4 Total Utang Pemerintah tahun 2001-2013

Tahun	Utang Pemerintah (dalam Triliun Rupiah)
2001	1,273,18
2002	1,225,15
2003	1,232,04
2004	1,299,50
2005	1,313,29
2006	1,302,16
2007	1,389,41
2008	1,636,74
2009	1,590,66
Tahun	Utang Pemerintah (dalam Triliun Rupiah)

2010	1,681,66
2011	1,808,95
2012	1,977,71
2013	2,354,54

Sumber : *Kementerian Keuangan RI*

Pada tabel IV.4 di atas adalah data utang pemerintah yang diambil dari utang pemerintah pusat pada tahun 2001-2013. Berdasarkan data total utang pemerintah tahun 2001-2013, dapat disimpulkan bahwa utang pemerintah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Khususnya kenaikan yang paling besar berada pada tahun 2012 menuju 2013.



Gambar IV.2 Model Aturan defisit (Z1) dan Aturan utang (Z2)

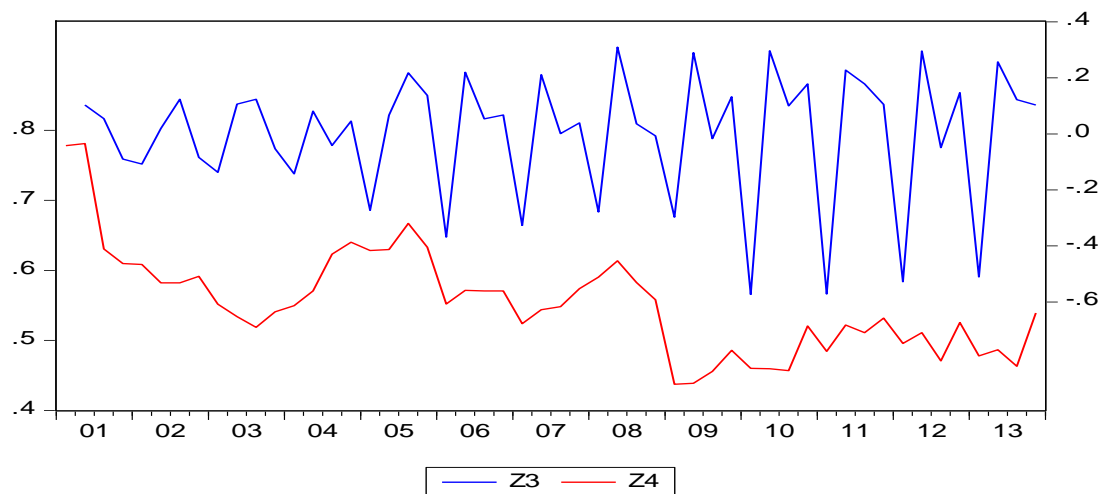
tahun 2001-2013

Dalam grafik IV.2 di atas terdapat 2 grafik yang pertama ditandai dengan warna biru adalah grafik kredibilitas aturan defisit (Z1) dan grafik kedua adalah grafik kredibilitas aturan utang menggunakan model AR (Z2AR). Indonesia telah menerapkan aturan kebijakan fiskal berdasarkan nilai defisit dan utang (maksimal masing-masing 3 dan 60 persen dari PDB). Nilai kredibilitas dari aturan defisit dan aturan utang diperoleh dengan

membandingkan anggaran yang terjadi dengan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam grafik tersebut dapat dilihat bahwa aturan defisit memiliki alur yang curam pada awal 2001. Hal ini terjadi karena adanya transformasi besar dalam keuangan publik dan disusul krisis keuangan global, maka kebijakan fiskal dalam model aturan defisit (Z1) pada realisasinya tidak sesuai dengan angka defisit yang telah ditetapkan dalam rancangan, kemudian pada tahun 2008 mengalami peningkatan karena di tahun tersebut adanya krisis financial global yang menyebabkan peningkatan antara defisit aktual dan defisit yang direncanakan.

Dalam alur aturan utang (Z2AR) pada tahun 2005 terjadi penurunan kredibilitas dalam utang, hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan utang aktual yang dilakukan pemerintah karena krisis bahan bakar dunia yang berdampak pada kenaikan bahan bakar minyak di Indonesia. Namun kredibilitas aturan utang naik kembali di tahun 2006 karena adanya penurunan utang aktual dari yang diproyeksikan. Kemudian terjadi peningkatan kredibilitas aturan utang pada tahun 2008, peningkatan kredibilitas aturan utang ini dikarenakan pemerintah menambah utang untuk membiayai belanja negara saat terjadi *Crisis financial* yang sedang melanda dunia.



Gambar IV.3 Model diskresioner (Z3) dan *Openness* (Z4) tahun 2001-2013

Dalam grafik IV.3 di atas terdapat 2 grafik yaitu yang ditandai dengan warna biru adalah grafik dari diskresioner (Z3) dan grafik kedua adalah grafik dari *openness* (Z4). Dalam grafik pertama yaitu grafik diskresioner (Z3) menunjukkan perubahan secara fluktuatif pada model diskresioner. Pada tahun 2009 hingga tahun 2013 diskresioner mengalami penurunan yang sangat tajam. Fluktuasi yang sangat tajam ini adalah akibat dari stimulus fiskal yang diberikan pemerintah, pada tahun 2009 pemerintah pusat lebih banyak mengeluarkan belanja negara karena untuk membiayai dampak yang timbul akibat peristiwa *financial crisis* pada tahun 2008.

Pada tahun 2009 pemerintah memberikan stimulus dengan pola yang sama seperti tahun 2004 dengan pendapatan negara berkontraksi sekitar 1,62% dari PDB dan belanja negara berkontraksi sekitar 2,36 % dari PDB dengan efek total berupa kontraksi kebijakan fiskal sekitar 0,74% dari PDB. Hasil perhitungan *fiscal impulse* ini mengindikasikan bahwa pemberian stimulus fiskal yang cukup besar dari sisi pendapatan dan belanja negara pada tahun 2009 tidak menimbulkan efek ekspansi bagi negara. Kemudian pada grafik kedua yaitu grafik dari *openness* (Z4) yang diperoleh dari *sector*

rill ekspor dan impor. Dalam grafik diatas menggambarkan bahwa keterbukaan ekonomi cenderung fluktuatif. Bahkan adanya peningkatan dalam volume ekspor.

Data penelitian ini diambil dari Bank Indonesia data Ekspor dan impor serta data total utang (penjumlahan utang dalam dan luar negeri) dalam mata uang domestik yang berasal dari pengelolaan utang pada triwulan. Sebenarnya beberapa data hanya tersedia dalam basis tahunan dan bulanan sehingga diinterpolasi secara linier menjadi kuartalan agar sesuai dengan data lainnya.

B. Pengujian Hipotesis

Dari data tersebut dilakukan pengolahan data dengan menggunakan program *Eviews* 8 dan dengan menetapkan 5% atau 0.05 sebagai nilai kritis. Hasil pengolahan data dari program *Eviews* 8 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Uji Linieritas

Uji Linieritas dilakukan untuk melihat nilai signifikan (F-probabilitas) dan membandingkannya dengan nilai kritis yaitu 0.05. Apabila nilai signifikan lebih besar dari nilai kritis maka H_0 diterima. Dari nilai Z1 aturan defisit terhadap variabel inflasi sebesar 0.31, maka $0.31 > 0.05$ berarti H_0 diterima dan garis regresi Z1 terhadap inflasi dinyatakan linier. Nilai kredibilitas Z2AR aturan utang terhadap variabel inflasi sebesar 0.33, maka $0.33 > 0.05$ berarti H_0 diterima dan garis regresi Z2AR terhadap inflasi dinyatakan linier. Nilai signifikansi Z3 diskresioner terhadap variabel inflasi sebesar 0.20, maka $0.20 > 0.05$ berarti H_0 diterima dan garis regresi Z3 terhadap Y dinyatakan linier. Nilai signifikansi Z4 *openness* terhadap variabel inflasi sebesar 0.66, maka $0.66 > 0.05$ berarti H_0 diterima dan garis regresi Z4 terhadap Y dinyatakan linier.

2. Persamaan Regresi Linier Berganda

Pemeriksaan model regresi umumnya dimulai dari nilai koefisien yang merupakan hasil pengujian terhadap koefisien regresi bersama-sama. Uji regresi yang dilakukan menggunakan model regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dan regresi linier dengan dummy variable. Berikut tabel hasil estimasi regresi *Ordinary Least Square* (OLS) pada output *Eviews 8*.

Tabel IV.5 Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda

Variable	Coeff.	t-Statistic	Prob.
C	0.293878	2.709430	0.0094
Z1	-0.240610	-1.833071	0.0733
Z2AR	-0.314743	-3.060898	0.0037
Z3	-0.004644	-0.531795	0.5974
Z4	0.074306	2.439839	0.0186
R ²	-	-	0.316741
R ² -adj	-	-	0.257327
F	5.331099	-	0.001299
DW	-	-	1.966996
N	-	-	51

Berdasarkan tabel hasil estimasi regresi pada output *Eviews 8*, maka koefisien yang didapat adalah sebesar 0.2938, sedangkan koefisien *slope* untuk kredibilitas aturan defisit (Z1), kredibilitas aturan utang (Z2AR), kebijakan fiskal diskresioner (Z3), dan *Openness* (Z4) secara berturut-turut masing masing yaitu (-0.2406), (-0.3147), (-0.0046), (0.0743). Dari koefisien tersebut dapat diasumsikan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1Z_1 + b_2Z_2AR + b_3Z_3 + b_4Z_4 + e$$

$$\text{Inflasi} = 0.2938 - 0.2406 Z_1 - 0.3147 Z_2AR - 0.0046 Z_3 + 0.0743 Z_4 + e$$

Persamaan regresi linear tersebut mengandung arti bahwa koefisien inflasi sebesar 29%, kemudian sebesar 24% kredibilitas aturan defisit berpengaruh negatif terhadap inflasi, sebesar 31% kredibilitas aturan utang berpengaruh negatif terhadap inflasi, sebesar 0.05% juga diskresioner memiliki pengaruh negatif terhadap inflasi dan sebesar 7% *openness* berpengaruh positif terhadap inflasi.

Koefisien variabel kredibilitas aturan defisit (Z_1) tidak signifikan mempengaruhi variabel inflasi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikan probabilitas variabel kredibilitas aturan defisit (Z_1) yaitu sebesar 0.0733 yang berarti nilai signifikan lebih besar dari nilai kritis yang ditentukan yaitu sebesar 0.05 ($0.0733 > 0.05$). Berbeda dengan koefisien variabel kredibilitas aturan utang (Z_2AR) yang secara signifikan mempengaruhi variabel inflasi, hal ini dapat terlihat dari tingkat signifikansi probabilitas variabel kredibilitas aturan utang (Z_2AR) yaitu sebesar 0.0037 yang lebih kecil dari 0.05 ($0.0037 < 0.05$) yang berarti variabel kredibilitas aturan utang (Z_2AR) memiliki pengaruh terhadap variabel inflasi.

Koefisien variabel diskresi (Z_3) secara signifikan tidak mempengaruhi variabel inflasi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi probabilitas variabel diskresioner (Z_3) sebesar 0.5974 yang berarti lebih besar daripada 0.05 ($0.5974 > 0.05$). Koefisien variabel *Openness* (Z_4) secara signifikan mempengaruhi variabel inflasi, hal ini terlihat dari tingkat signifikansi probabilitas variabel *Openness* (Z_4) sebesar 0.0186 yang lebih kecil dari 0.05 ($0.0186 < 0.05$) yang berarti variabel *Openness* (Z_4) memiliki pengaruh terhadap variabel inflasi.

Kemudian regresi linier berganda menggunakan model regresi Z1, Z2AR, Z3, dan Z4 pada inflasi dengan menambahkan variabel dummy *inflation targeting* pada tahun 2005 kedalamnya.

Tabel IV.6 Hasil Estimasi dengan Dummy 2005

	OLS			Inflation Targeting 2005		
	Coeff	t-Statistic	Prob	Coeff.	t-Statistic	Prob
Coeff	0.2938	2.7094	0.0094	0.2538	2.2487	0.0295
Z1	-0.2406	-1.8330	0.0733	-0.2723	-2.0446	0.0468
Z2AR	-0.3147	-3.0608	0.0037	-0.2925	-2.8139	0.0072
Z3	-0.0046	-0.5317	0.5974	-0.0059	-0.6785	0.5009
Z4	0.0743	2.4398	0.0186	0.0994	2.7066	0.0096
D2W5	-	-	-	0.0061	1.2100	0.2326
R2	-	-	0.3167	-	-	0.3382
R2-adj	-	-	0.2573	-	-	0.2647
F	5.3310	-	0.0012	4.6007	-	0.0017
DW	-	-	1.9669	-	-	2.0783
N	-	-	51	-	-	51

Kemudian untuk model regresi dengan menambahkan variabel dummy *inflation targeting* pada tahun 2005 menunjukkan hasil koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.3382. Hal ini menunjukkan bahwa variabel–variabel independent yaitu aturan defisit (Z1), aturan utang (Z2AR), diskresi (Z3) dan *openness* (Z4) serta variabel dummy inflation

targeting pada tahun 2005 mampu menjelaskan variasi atau perubahan inflasi hingga 33%.

Kemudian tabel di atas juga menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-hitung (F-statistik) lebih kecil dari 0.05 yaitu sebesar 0.0012 sebelum dimasukkan variabel dummy, sementara F-hitung setelah dimasukkan variabel dummy 2005 sebesar 0.0017, secara keseluruhan variabel independent, yaitu kredibilitas kebijakan fiskal dilihat dari varian Z1, Z2AR, Z3 dan Z4 baik dengan ditambah dummy *inflation targeting* tahun 2005 ataupun tidak dengan ditambah variabel dummy akan dapat menjelaskan inflasi.

Selanjutnya, temuan dengan menambahkan variabel dummy *inflation targeting* pada tahun 2005 menunjukkan hasil tidak signifikan, hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas D2005 yaitu sebesar 0.2326 yang berarti lebih dari 0.05 ($0.2326 > 0.05$). Hal tersebut menunjukkan bahwa baik sebelum ada *inflation targeting* maupun sesudah adanya *inflation targeting* pada tahun 2005 tidak berdampak terhadap penurunan inflasi. Kemudian koefisien D2005 pada inflasi yang menunjukkan positive (+) dan tidak signifikan menunjukkan bahwa baik sebelum maupun sesudah fenomena *inflation targeting* tahun 2005 tidak memiliki dampak bagi inflasi.

Variabel dummy tahun 2005 tentang *inflation targeting* ini tidak signifikan dikarenakan pada tahun 2005 dapat dilihat dalam grafik IV.1 bahwa trem inflasi ditahun 2005 mengalami lonjakan kenaikan, yang berarti target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Sentral Indonesia tidak sejalan dengan realisasinya pada saat itu. Inflasi yang terjadi ini disebabkan karena krisis minyak dunia dan berdampak pada harga bahan bakar di Indonesia pada kuartal ke 4 ditahun 2005, sementara *inflation targeting* sudah ada pada kuartal ketiga tahun 2005.

Melihat hasil dari pengujian di atas, bahwa hasil menunjukkan yang lebih baik adalah dengan metode regresi sederhana tanpa menggunakan variabel dummy tahun 2005 tentang *inflation targeting*, karena variabel dummy tahun 2005 tentang *inflation targeting* telah diuji dan hasil menunjukkan tidak lolos, maka dengan demikian peneliti hanya memfokuskan pembahasan penelitian tanpa menggunakan variabel dummy 2005.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dapat dilihat dari hasil estimasi regresi linier berganda tanpa variabel dummy dengan melihat nilai R Square (R^2). Dari hasil output, diperoleh nilai R^2 sebesar 0.3167. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yaitu kredibilitas aturan defisit (Z1), kredibilitas aturan utang (Z2AR), diskresioner (Z3), dan *Openness* (Z4) mampu menjelaskan inflasi hingga 32% dan sekitar 68% dijelaskan oleh variabel lain.

4. Uji t

Dalam analisis regresi linier berganda juga dilakukan uji koefisien regresi, yaitu dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel dengan nilai kritis 0,05, maka diperoleh nilai t-tabel (0,05;47) sebesar 2,0117. Koefisien variabel kredibilitas aturan defisit (Z1) memiliki nilai t-hitung < t-tabel (-1.833071 < 2,011741). Hal ini menunjukkan bahwa kredibilitas aturan defisit tidak signifikan berpengaruh negatif terhadap inflasi. Koefisien variabel kredibilitas aturan utang (Z2AR) memiliki nilai t-hitung > t-tabel (-3.060898 > 2,011741). Hal ini menunjukkan bahwa kredibilitas aturan utang signifikan berpengaruh negatif terhadap inflasi. Koefisien variabel diskresi (Z3)

memiliki nilai t-hitung $<$ t-tabel ($0.531795 < 2,011741$). Hal ini menunjukkan bahwa diskresioner tidak signifikan berpengaruh negatif terhadap inflasi. Koefisien variabel *openness* (Z4) memiliki nilai t-hitung $>$ t-tabel ($2.439839 > 2,011741$). Hal ini menunjukkan bahwa *openness* signifikan berpengaruh positif terhadap inflasi.

5. Uji F

Hasil estimasi regresi linier berganda tanpa variabel dummy menunjukkan bahwa F-hitung sebesar 5.3310 pada taraf signifikan $F(0.05,4,47)$ diperoleh nilai F-tabel sebesar 2.5695. maka H_0 ditolak artinya secara keseluruhan variabel independent yaitu kredibilitas kebijakan fiskal yang dilihat dari aturan defisit, aturan utang, diskresi dan *openness* berdampak terhadap inflasi.

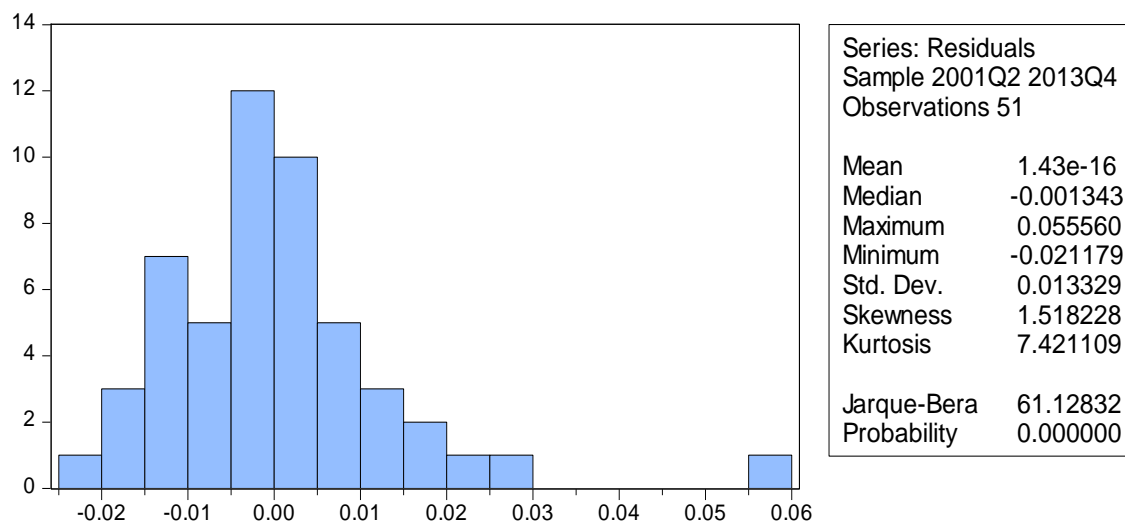
6. Uji Asumsi Klasik

Uji klasik digunakan untuk mengetahui apa yang terjadi pada sifat – sifat penaksir *Ordinary Least Squares* (OLS) apakah satu atau lebih dari asumsi tadi dapat dipenuhi atau tidak. Jika asumsi ini dipenuhi, maka parameter yang diperoleh dengan OLS adalah bersifat *Best Linier UnBiased Estimator* (BLUE).

a. Uji Normalitas

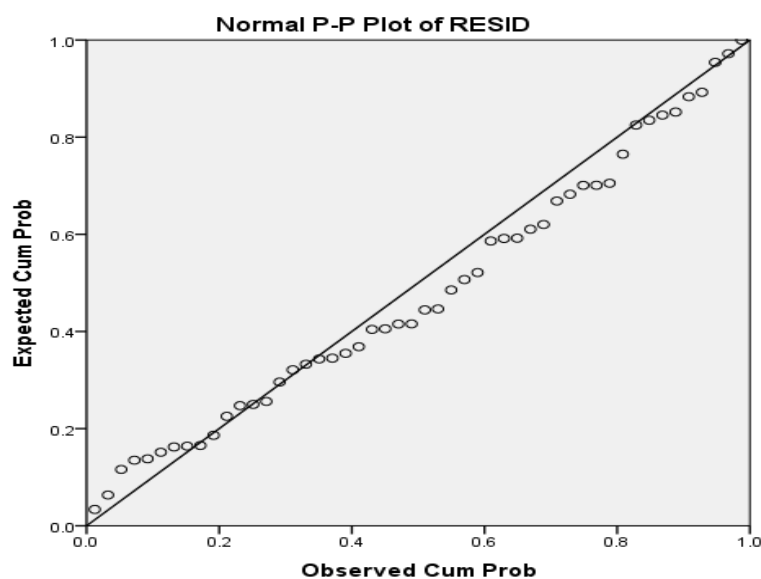
Uji normalitas dilakukan untuk menguji asumsi kenormalan distribusi residual/error dan dilakukan uji normalitas dengan hipotesis sebagai berikut:

- H_0 : Error berdistribusi normal
- H_a : Error tidak berdistribusi normal



Gambar IV.4 Hasil Uji Normalitas Dalam *Eviews*

Hasil output dalam *Eviews* 8 dengan melihat nilai probabilitas 0.05 maka menunjukkan eror tidak berdistribusi normal karena probabilitas kurang dari 0.05 ($0.000 < 0.05$) yang mana seharusnya probabilitas > 0.05 , namun dengan melihat *p-value Jarque-Bera* $< Chi Square$ ($61.12 < 67.50$), maka dengan demikian, H_0 ditolak yang artinya eror berdistribusi normal.



Gambar IV.5 Hasil Uji Normalitas Dalam *P-Plot SPSS*

Melihat uji normalitas dalam e-views menggunakan probabilitas tidak normal sedangkan menggunakan Jarque-Bera menunjukkan eror berdistribusi normal, maka peneliti membandingkan dengan P-Plot dalam SPSS, dan mengikuti hasil visual dari P-Plot menunjukkan bahwa hasil persebaran data mengikuti garis, sehingga eror masih dapat dikatakan berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dilakukan uji LM Test dengan hipotesis :

Ho : tidak ada autokorelasi

Ha : ada autokorelasi

Tabel IV.7 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.320494	Prob. F(2,44)	0.7275
Obs*R-squared	0.732294	Prob. Chi-Square(2)	0.6934

Berdasarkan uji autokorelasi menunjukkan p -value prob, *Chi Square* adalah 0,6934 yang berarti lebih besar dari 0,05 ($0,6934 > 0,05$), maka Ho diterima, yang artinya tidak terdapat autokorelasi.

c. Uji Heterokedastisitas

Setelah mengetahui bahwa data berdistribusi normal dan tidak terdapat autokorelasi maka untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas akan dilakukan uji heterokedastisitas menggunakan model *Harvey* dengan hipotesis sebagai berikut :

Ho: Varians error bersifat homoskedastisitas

Ha : Varians error bersifat Heteroskedasitas

Tabel IV.8 Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Harvey

F-statistic	0.673874	Prob. F(4,46)	0.6135
Obs*R-squared	2.823060	Prob. Chi-Square(4)	0.5879
Scaled explained SS	2.580482	Prob. Chi-Square(4)	0.6303

Berdasarkan model *harvey* menunjukkan bahwa *p-value* prob. *Chi square* adalah 0,5879 yang adalah lebih besar dari pada 0.05 ($0,5879 > 0.05$). Maka Ho diterima, yang artinya tidak adanya pengaruh heterokedastisitas, dengan demikian residual pada model tersebut dapat dikatakan memenuhi asumsi homoskedastisitas.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dan data yang telah diolah maka akan diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Aturan Defisit (Z1)

Koefisien regresi variabel aturan defisit (Z1) sebesar -0.2406 yang menyatakan bahwa setiap penambahan atau kenaikan satu nilai pada variabel kredibilitas aturan defisit

(Z1) akan memberikan penurunan sebesar 24% pada inflasi jika hasil signifikan. Namun koefisien variabel aturan defisit (Z1) dinyatakan tidak signifikan mempengaruhi variabel inflasi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikan variabel aturan defisit (Z1) sebesar 0.0733 yang berarti lebih besar dari alfa yang ditentukan yaitu 0.05 ($0.0733 > 0.05$). Sehingga artinya kenaikan 1% dari kredibilitas aturan defisit (Z1) tidak diikuti oleh penurunan inflasi.

Kemudian untuk hasil t-statistik yang lebih kecil dari t-tabel ($-1.8330 < 2.0117$), menyatakan bahwa aturan defisit tidak kredibel. Selanjutnya melihat pengujian dengan menambahkan variabel dummy *inflation targeting* pada tahun 2005 juga menunjukkan hasil yang tidak signifikan, sehingga pembahasan penelitian ini fokus pada hasil menggunakan uji sederhana tanpa variabel dummy.

Dari hasil tersebut, menariknya ketika peneliti menambahkan variabel dummy tahun 2005 tentang *inflation targeting*, tetapi variabel dummy tersebut tidak signifikan terhadap inflasi, terbukti dari tingkat inflasi yang tidak stabil atau bahkan mengalami kenaikan, maka terlihat bahwa kurangnya koordinasi antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal untuk menetapkan dan mencapai target-target moneter dan defisit APBN secara konsisten dalam rangka mencapai kestabilan inflasi⁶⁵. Hal ini terjadi karena pelaksanaan penargetan yang dilaksanakan Bank Sentral tidak memuaskan baik dalam menurunkan tingkat inflasi maupun dalam mengarahkan laju inflasi aktual dengan inflasi yang telah ditargetkan.

Dalam temuan sebelumnya yang berbeda dengan penelitian ini adalah penelitian dari Rosyetti dan Eriyati tentang defisit anggaran terhadap inflasi di Indonesia, ia menemukan

⁶⁵ Anggito Abimanyu, Andie Megantara, op.cit, p.65

dalam jangka pendek defisit anggaran tidak signifikan terhadap inflasi tetapi mempunyai hubungan positif artinya apabila hasilnya signifikan jika defisit anggaran meningkat maka inflasi akan meningkat, sementara dalam jangka panjang terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara kedua variabel tersebut.

Dalam penelitian tersebut terdapat pembahasan bahwa kebijakan pemerintah melaksanakan defisit pembiayaan anggaran banyak menimbulkan kontroversi. Banyak ekonom yang berpendapat bahwa defisit anggaran pemerintah dapat berpengaruh buruk bagi perekonomian. Namun banyak juga ekonom yang berpendapat bahwa defisit anggaran pemerintah diperlukan sebagai stimulus bagi perekonomian, sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik⁶⁶.

Dalam menstimulus pertumbuhan ekonomi memang beberapa ekonom berpendapat bahwa anggaran defisit, baik untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi, tetapi anggaran defisit melalui peningkatan pengeluaran pemerintah dapat menaikkan pendapatan masyarakat sehingga konsumsi meningkat, kemudian dengan peningkatan konsumsi maka harga akan meningkat akibat adanya peningkatan tenaga kerja dan peningkatan biaya produksi⁶⁷. Sehingga diperlukan aturan defisit untuk mengatur anggaran perencanaan dan anggaran aktual.

Penelitian sebelumnya yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian dari Ahmad Yusuf tentang analisis regulasi batasan defisit anggaran, ia menemukan bahwa defisit anggaran perlu untuk dibatasi terkait dengan jumlah pembiayaan utang yang akan menimbulkan risiko terhadap kesinambungan fiskal suatu negara dan berdampak pada

⁶⁶ Rosyetti Eriyanti, "Pengaruh Defisit Anggaran terhadap Inflasi di Indonesia tahun 1981-2010", (Jurnal ekonomi, 2012), p. 6-7.

⁶⁷ Gregory Mankiw, "Teori Makro Ekonomi", (Jakarta : Erlangga, 2013), P.153

kestabilan makroekonomi terutama inflasi⁶⁸. Dengan adanya aturan defisit yang kredibel, maka defisit anggaran yang disebabkan tingginya pengeluaran pemerintah akan memberikan sinyal kepada masyarakat akan ada kenaikan pajak, sehingga sebelum terjadinya kenaikan pajak, masyarakat sudah lebih dahulu memilih untuk menabung pendapatannya daripada mengkonsumsi banyak barang sehingga harga tetap stabil dan inflasi juga tetap stabil.

Melihat kasus di Indonesia aturan defisit ini tidak signifikan disebabkan karena tidak adanya kredibilitas di dalam aturan tersebut. Tidak disiplin dalam menjalankan aturan defisit yang direncanakan, mengakibatkan kredibilitas dalam aturan defisit itu sendiri menjadi tidak kredibel. Dapat dilihat dari pengelolaan APBN yang kurang baik, dimana adanya penyimpangan yang besar antara defisit aktual dengan yang direncanakan, serta banyak anggaran yang dikeluarkan tersebut belum sepenuhnya terserap / dibelanjakan dengan baik, melainkan adanya ketidakdisiplinan dalam birokrasi politik seperti adanya korupsi dalam anggaran pengeluaran seperti terdapat manipulasi anggaran yang ditetapkan oleh DPR ataupun DPRD dan dalam penerimaan negara berupa pajak juga masih banyak dikorupsi oleh oknum dalam birokrasi politik.

Selain itu juga tidak adanya komitmen dalam menjaga konsistensi anggaran menjadikan kredibilitas aturan defisit tidak kredibel. Apabila aturan defisit selama ini dijalankan secara konsisten dan berkomitmen dimana antara defisit aktual tidak lebih besar dari yang direncanakan maka defisit anggaran akan mampu menurunkan tingkat inflasi, namun sangat disayangkan bahwa tidak adanya komitmen tersebut menjadikan aturan defisit tidak kredibel.

⁶⁸ Ahmad Yusuf, "Analisis Regulasi Batasan Defisit Anggaran", 2012. P:7

2. Aturan Utang (Z2AR)

Koefisien regresi variabel aturan utang (Z2AR) adalah sebesar -0.3147 yang menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada variabel aturan utang akan memberikan penurunan sebesar 31% pada inflasi. Koefisien variabel aturan utang (Z2AR) secara signifikan mempengaruhi variabel inflasi, hal ini terlihat dari tingkat signifikansi variabel aturan utang (Z2AR) sebesar 0.0037 yang lebih kecil dari 0.05 ($0.0037 < 0.05$) yang berarti kenaikan 1% dari kredibilitas aturan utang (Z2AR) diikuti oleh penurunan inflasi.

Kemudian hasil t-statistik yang lebih besar dari t-tabel ($-3.0608 < 2.0117$), maka dinyatakan bahwa aturan utang kredibel. Kemudian setelah melihat pengujian dengan menambahkan variabel dummy untuk *inflation targeting* pada tahun 2005 menemukan hasil yang tidak signifikan, sehingga peneliti hanya fokus pada pembahasan hasil yang menggunakan uji sederhana tanpa variabel dummy.

Berdasarkan data di atas maka kredibilitas dalam aturan utang ini sangat berdampak terhadap tingkat inflasi. Dalam mengatasi defisit anggaran yang terjadi pemerintah Indonesia melakukan utang baik dari dalam negeri maupun luar negeri pada saat pemerintah mengeluarkan obligasi untuk membiayai defisit anggaran akan berdampak pada kenaikan suku bunga yang tinggi sehingga dapat menurunkan investasi dan membuat perekonomian melemah, hal ini menurut paradigma Klasik menyebabkan terjadinya *crowding-out*. Melihat kasus di Indonesia, pembayaran defisit pada era orde baru untuk pembangunan jangka lima tahun dibiayai oleh utang luar negeri. Dampaknya, Indonesia mengalami pertumbuhan pesat, tetapi krisis tahun 1998 juga membuat

Indonesia terpuruk karena pembiayaan pembangunan melalui utang luar negeri yang sangat besar.

Sehingga dalam era reformasi, pemerintah dan DPR di Indonesia membuat keputusan politik bahwa defisit anggaran sejauh mungkin harus dibiayai oleh sumber keuangan domestik. Akibatnya jumlah stok utang dalam negeri naik hingga sepuluh kali (100 triliun pada tahun 1998 menjadi 1000 triliun pada tahun 2009)⁶⁹. Sehingga pembayaran bunga dan cicilan utang publik meroket, serta pembayaran utang dalam negeri dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan pembayaran utang luar negeri.

Melihat naiknya utang pemerintah akibat defisit anggaran yang meningkat membuat aturan utang sangat diperlukan, Paradigma Keynes juga berpendapat bahwa batasan-batasan dalam aturan fiskal seperti aturan defisit dan aturan utang diperlukan untuk menghindari dampak *Crowding-Out*. Walaupun utang diperlukan untuk menyeimbangkan anggaran, aturan utang sangat berfungsi untuk memastikan disiplin anggaran yang melindungi perekonomian dari eksesi inflasi (Ali Wardana, 2009)⁷⁰. Aturan utang menjadi penting untuk mengembalikan kepercayaan pelaku ekonomi yang telah hilang akibat utang yang tinggi, karena kepercayaan para pelaku ekonomi adalah penyebab utama timbulnya krisis yang berkepanjangan dan kembalinya kredibilitas adalah kunci utama untuk keluar dari krisis (Marzuki Usman, 2009)⁷¹.

Melihat celah sempit antara utang aktual dengan utang yang diproyeksikan, maka membuat kredibilitas aturan utang menjadi baik, sehingga aturan tersebut efektif untuk dijalankan. Kredibilitas aturan utang ini lebih kredibel dibandingkan dengan aturan

⁶⁹ Harya Kuncara, "Does The Credible Fiscal Policy support the price stabilization?", (Review of Economic Perspective, 2015), p.16

⁷⁰ Anggito Abimanyu, Andie Megantara, op.cit, p.27

⁷¹ Ibid., p.115

defisit hal ini dikarenakan melihat pada saat *pasca* krisis keuangan global tingkat inflasi cenderung tinggi namun mengakibatkan nilai riil stok utang secara konsisten menurun, meskipun pada kasus inflasi akan menaikkan utang nominal tetapi tetap memberikan penurunan yang konsisten terhadap nilai riil stok utang⁷². Sebaliknya dalam aturan defisit tingkat inflasi yang tinggi pada saat *pasca* krisis keuangan global dapat membuat pemerintah meningkatkan subsidi sehingga mengakibatkan defisit yang lebih tinggi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryo Kuncoro dalam temuannya bahwa aturan utang memang lebih signifikan dibandingkan dengan aturan defisit. Kredibilitas kebijakan aturan utang dalam model AR berhasil mengurangi tingkat inflasi, Hal ini tersirat bahwa celah sempit antara utang aktual dibandingkan dengan utang yang ditargetkan mampu mengurangi ketidakpastian yang cukup besar pada periode berjalan yang kemudian diubah menjadi risiko yang lebih rendah ditingkat harga. Akhirnya perilaku tingkat inflasi cenderung stabil atau bahkan menurun dalam jangka panjang sehubungan dengan peningkatan kredibilitas pengelolaan utang⁷³.

3. Diskresioner (Z3)

Koefisien regresi variabel diskresioner (Z3) sebesar -0.0046 yang menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada variabel diskresioner (Z3) akan memberikan penurunan sebesar 0.4% pada inflasi. Koefisien variabel diskresioner (Z3) tidak signifikan mempengaruhi variabel inflasi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi variabel diskresioner (Z3) sebesar 0.5974 yang berarti lebih besar daripada 0.05 (0.5974 > 0.05). Hasil menunjukkan koefisien negatif yang memiliki arti bahwa kenaikan 1% dari

⁷² Gregory Mankiw, *op.cit*, P.377

⁷³ Harya Kuncara, *op.cit*, p. 15-16

diskresioner tidak berdampak pada penurunan inflasi. Kemudian melihat pengujian dengan menambahkan variabel dummy *inflation targeting* pada tahun 2005 juga menemukan hasil yang tidak signifikan sehingga pembahasan penelitian ini hanya fokus pada hasil regresi sederhana tanpa variabel dummy.

Berbeda dengan penelitian dari Stefan Niemann yang menjelaskan hasil yang signifikan dengan koefisien negatif berpengaruh antara diskresioner dengan inflasi, dimana kebijakan diskresioner dapat menghasilkan penurunan yang tajam dalam inflasi, ketika stok utang semakin banyak maka lebih baik menggunakan kebijakan diskresioner untuk meredam kejutan inflasi yang ada⁷⁴.

Ketika terjadi defisit anggaran yang tidak direncanakan akan menimbulkan kenaikan inflasi, dalam hal ini diskresioner mampu berperan untuk menurunkan tingkat inflasi dengan menaikkan pajak sehingga dengan kenaikan pajak masyarakat akan enggan untuk mengkonsumsi barang sehingga permintaan agregat turun dan dapat menstabilkan inflasi. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai, misalnya, akan mempengaruhi keputusan konsumsi pelaku ekonomi, sehingga akan berdampak terhadap menurunnya tekanan inflasi (Hermawan Munro, 2008)⁷⁵.

Meskipun kebijakan diskresioner mampu merespon guncangan yang tak terduga, tetapi pada kenyataannya kebijakan diskresioner juga dapat menjadi salah sasaran, sehingga terjadi defisit secara terus-menerus dengan kebijakan pro-siklikal, meningkatnya tingkat utang, dan dari waktu ke waktu kebijakan akan kehilangan kredibilitasnya akibat volatilitas kebijakan fiskal (Kumar dan Ter-Minassian, 2007)⁷⁶.

⁷⁴ Niemann, Stefan,dkk,“ *Public debt, discretionary policy, and inflation persistence*”, (Journal of economic dynamics and control, 2013), p.7-9

⁷⁵ Anggito Abimanyu, Andie Megantara, *op.cit*, p.146

⁷⁶ Haryo Kuncoro, *Does The Credible Fiscal Policy Reduce Its Volatility? The Case of Indonesia*, *op.cit*, p.382

Penelitian ini Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dituliskan oleh Ndari Surjaningsih, G. A. Diah Utari dan Budi Trisnanto yang mengatakan hal yang sama bahwa di negara berkembang besaran kebijakan fiskal diskresioner dalam inflasi tidak signifikan karena kebijakan fiskal diskresioner dapat membahayakan makroekonomi⁷⁷.

Rother dalam penelitiannya dengan menggunakan panel data 15 negara industri, juga menyimpulkan kenaikan diskresioner fiskal sebesar 1 standar deviasi akan menyebabkan kenaikan *unconditional* inflasi rata-rata sebesar 10%, dan 17% untuk *conditional* inflasi. Dari perspektif kebijakan tersebut, hasil penelitiannya mengindikasikan bahwa diskresi fiskal memberikan dampak destabilisasi daripada stabilitas makroekonomi⁷⁸.

Dalam penelitian ini menjelaskan diskresioner tidak signifikan menjelaskan inflasi karena untuk masalah makroekonomi pemerintah sulit untuk mengambil kebijakan dalam waktu singkat berdasarkan masalah yang terjadi pada saat itu. Kebijakan yang diambil pemerintah memerlukan waktu untuk diputuskan bersama hingga sampai pada pelaksanaannya, oleh karena itu memerlukan waktu yang lama hingga pada akhirnya akan sulit untuk mengatasi inflasi yang terjadi⁷⁹. Kebijakan diskresioner sangat membutuhkan adanya kehati-hatian dalam mempertimbangkan kondisi perekonomian suatu negara, apabila pemerintah salah langkah mengambil keputusan saat membuat kebijakan maka akan berakibat memperburuk kondisi perekonomian.

Untuk kasus Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Akitoby, et.al. (2004) dan Baldacci (2009) belum menemukan adanya *countercyclicality* dalam kebijakan fiskal,

⁷⁷ Surjaningsih, Ndari & dkk, “*Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi*”, (Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 2012), p.399

⁷⁸ Rother, Philipp, “*Fiscal Policy and Inflation Volatility*”, (Working paper series, European Central Bank, 2004), p.7

⁷⁹ William A McEachern, “*Ekonomi Makro : Pendekatan Kontemporer*”, (Jakarta : Salemba Empat, 2000), p. 327

karakter kebijakan fiskal Indonesia lebih cenderung asiklikal atau bahkan prosiklikal⁸⁰, sehingga kebijakan diskresioner dapat lebih membahayakan kestabilan makroekonomi. Seharusnya, kebijakan pemerintah lebih *contra-cyclical* saat terjadi masalah, dimana dalam *contra-cyclical* ini artinya, dalam kondisi perekonomian sedang mengalami ekspansi, maka pengeluaran pemerintah seharusnya berkurang atau penerimaan pajak yang bertambah dengan menaikkan tariff pajak. Sebaliknya, jika perekonomian sedang mengalami kontraksi, kebijakan fiskal seharusnya ekspansif melalui peningkatan belanja pemerintah baik belanja pemerintah dalam konsumtif, investatif dan transfer.

4. *Openness (Z4)*

Koefisien regresi variabel *openness (Z4)* adalah sebesar 0.0743 yang menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada variabel *Openness (Z4)* akan memberikan kenaikan sebesar 7% pada inflasi. Koefisien variabel *Openness (Z4)* secara signifikan mempengaruhi variabel inflasi, hal ini terlihat dari tingkat signifikan yang lebih kecil dari 0.05 yang berarti kenaikan 1% dari variabel *openness (Z4)* berdampak pada kenaikan inflasi. Kemudian setelah melihat pengujian dengan menambahkan variabel dummy untuk *inflation targeting* pada tahun 2005 menyatakan hasil yang tidak signifikan, sehingga pembahasan penelitian ini hanya fokus pada hasil yang menggunakan uji sederhana tanpa variabel dummy.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Luis A.V, Cata dan Marco E.Terrones menemukan hasil bahwa adanya hubungan negatif antara inflasi dengan *openness*. Dalam

⁸⁰ Surjaningsih, Ndari & dkk, *op.cit*, p.391

penelitiannya itu terdapat bahwa keterbukaan ekonomi yang tinggi dapat menaikkan output, sementara keterbukaan yang tinggi juga dapat menurunkan inflasi⁸¹.

Berbeda dengan penelitian ini yang sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari T.Panjaitan yang menemukan hasil bahwa kenaikan dari *openness* signifikan dan mampu menaikkan inflasi⁸². Selain itu juga sejalan dengan penelitian dari Hafiza, Abrar yang menemukan hasil bahwa dalam jangka pendek terdapat hubungan positif antara keterbukaan ekonomi terhadap inflasi⁸³. Suatu negara yang melakukan keterbukaan ekonomi yang semakin tinggi dalam jangka pendek akan mampu meningkatkan inflasi, akibat permintaan yang meningkat, akan tetapi juga mampu meningkatkan PDB akibat kenaikan pendapatan negara dari sektor riil, sehingga tetap diperlukan adanya keterbukaan ekonomi.

David Ricardo telah mengemukakan pandangan-pandangan untuk menerangkan perlunya perdagangan internasional dalam mengembangkan suatu perekonomian. Teori Ricardo, menerangkan mengenai keuntungan yang dapat diperoleh dari spesialisasi dan perdagangan luar negeri⁸⁴. Meskipun ada keuntungan yang diperoleh dari keterbukaan ekonomi, namun penularan inflasi dari luar negeri ke dalam negeri memang mudah terjadi pada negara-negara yang perekonomiannya terbuka⁸⁵.

Dalam penelitian Ahmad Jafari juga menjelaskan bahwa di beberapa kelompok negara berkembang menunjukkan hasil *Openness* membawa pengaruh secara signifikan

⁸¹ Catao,Luis, dkk, “ *Fiscal deficit and inflation*”, (Journal of monetary economics, 2005), p.18

⁸² T, Panjaitan, “*Analisis Pengaruh Perekonomian Terbuka Terhadap Inflasi di Indonesia :Periode 2005:07 – 2012:06*”, (Fakultas Ekonomi, Universitas Lampung, 2013), p.69

⁸³ Hafiza,Abrar,“*Analisis Pengaruh Keterbukaan Perdagangan (Trade Openness) dan Inflasi di Indonesia tahun 2000-2015 : Pendekatan Vector Error Correction Model (VECM)*”, 2015, p.100

⁸⁴ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, *op.cit*, p.360

⁸⁵ Boediono, *op.cit*, p.164

dengan koefisien positif terhadap inflasi⁸⁶. *Openness* dalam penelitian ini dilihat dari sektor riil yaitu ekspor dan impor, dimana telah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara terbuka yang melakukan kegiatan ekspor dan impor.

Di beberapa negara berkembang keterbukaan ekonomi mampu menaikkan inflasi, hal ini dikarenakan negara berkembang belum memiliki daya saing yang tinggi dibandingkan dengan negara maju. Permintaan barang di negara berkembang tidak sebanyak permintaan barang dari negara maju, sehingga negara importir memiliki kemampuan untuk menentukan harga lebih besar kepada negara berkembang. Sehingga peningkatan harga barang impor mampu meningkatkan biaya produksi dan harga barang domestik yang ditawarkan juga akan meningkat.

Selain itu juga, seperti halnya ketika harga barang dunia mengalami kenaikan maka Indonesia juga akan terkena dampaknya, contohnya saja kenaikan harga minyak dunia yang menyebabkan kenaikan pada harga BBM yang berdampak juga pada kenaikan harga barang-barang secara umum akibat adanya kenaikan biaya transportasi. Sehingga data mendukung penjelasan yang ada yaitu signifikan dan positif yang berarti kenaikan pada keterbukaan ekonomi suatu negara akan meningkatkan inflasi, hal ini menunjukkan bahwa adanya sensitivitas tingkat inflasi terhadap guncangan eksternal.

Melihat keterbukaan ekonomi menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi karena dapat menambah pendapatan bagi negara, maka tetap diperlukan adanya keterbukaan ekonomi bagi suatu negara, meskipun keterbukaan ekonomi tersebut berpeluang besar untuk meningkatkan inflasi, namun dibutuhkan adanya kekuatan dari produsen dalam negeri untuk menghadapi keterbukaan ekonomi tersebut.

⁸⁶ Jafari,Ahmad Samimi, dkk,“ Openness and Inflation : New empirical panel data evidence”, (Economics Letter, 2012), p.4

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini meneliti kredibilitas kebijakan fiskal dalam aturan defisit, aturan utang, diskresi dan *openness* sebagai variabel bebas serta inflasi sebagai variabel terikat, dengan menggunakan data dalam bentuk kuartal dari tahun 2001-2013 di Indonesia. Berdasarkan data yang telah dieksekusi dengan menggunakan aplikasi *Eviews 8*, terdapat beberapa kesimpulan dalam temuan yang telah peneliti lakukan, diantaranya:

- Kredibilitas kebijakan aturan defisit (Z1) dengan koefisien negatif tidak signifikan menjelaskan inflasi. Berarti bahwa kenaikan kredibilitas aturan defisit tidak berdampak pada penurunan inflasi.
- Kredibilitas kebijakan aturan utang dalam model AR (Z2AR) dengan koefisien negatif dan signifikan menjelaskan inflasi. Berarti bahwa kenaikan kredibilitas aturan utang berdampak pada penurunan inflasi di Indonesia.
- Kebijakan diskresioner (Z3) dengan koefisien negatif dan tidak signifikan menjelaskan inflasi. Berarti bahwa kebijakan diskresioner yang dilakukan pemerintah tidak berdampak pada penurunan inflasi.
- *Openness* (Z4) yang diambil dari sektor riil (ekspor dan impor) dengan koefisien positif signifikan menjelaskan inflasi. Berarti bahwa kenaikan *openness* baik dalam ekspor ataupun impor berdampak pada kenaikan inflasi.

- Jadi kebijakan fiskal yang kredibel terhadap inflasi terbukti secara statistik lebih cepat mencapai keseimbangan daripada kebijakan fiskal yang tidak kredibel. Artinya semakin kredibel kebijakan fiskal akan membawa dampak efektivitas kebijakan kearah yang dituju menjadi semakin cepat.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka implikasi dari penelitian ini adalah kredibilitas aturan defisit terdapat hasil yang tidak kredibel sehingga tidak mampu menurunkan inflasi. Hal ini disebabkan karena pengeluaran negara yang belum terserap dengan baik dan banyaknya ketidakdisiplinan terhadap uang negara serta tidak adanya komitmen dan konsistensi dalam menjalankan kebijakan yang direncanakan sehingga terjadi celah besar antara defisit aktual dengan defisit yang direncanakan. Kemudian mengakibatkan masyarakat tidak percaya terhadap aturan defisit untuk menstabilkan inflasi. Dan pada akhirnya aturan defisit kehilangan kredibilitasnya, dengan tidak adanya kredibilitas dari aturan defisit mengakibatkan anggaran tidak terkendali dan dapat meningkatkan defisit anggaran yang dapat menyebabkan kenaikan inflasi yang tinggi. Dengan demikian berarti bahwa faktor-faktor politik dan kelembagaan menjadi kendala dalam kredibilitas kebijakan aturan defisit.

Selanjutnya kredibilitas aturan utang signifikan terhadap inflasi memiliki arti bahwa kredibilitas aturan utang berdampak pada penurunan inflasi, dan untuk aturan utang mendapatkan hasil bahwa aturan utang dinyatakan kredibel. Hal ini terlihat dari simpangan antara utang *actual* dengan utang *planning* yang tidak besar, sehingga dengan aturan utang yang kredibel membuat pelaku ekonomi merasa percaya untuk

meminjamkan atau memberikan utang kepada Indonesia dengan demikian dana yang didapat digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi sehingga negara tidak mengalami inflasi karena tingginya defisit anggaran.

Kredibilititas aturan utang ini lebih kredibel dibandingkan dengan aturan defisit hal ini karena melihat pada saat *pasca* krisis keuangan global tingkat inflasi cenderung tinggi namun mengakibatkan nilai *rill* stok utang secara konsisten menurun, hal ini dikarenakan pada kasus inflasi akan menaikkan utang nominal namun memberikan penurunan yang konsisten terhadap nilai *rill* stok utang. Oleh karena itu aturan utang lebih kredibel dan diperlukan konsistensi dari pemerintah dalam penerapan aturan utang agar tetap memiliki kredibilitas yang baik.

Selanjutnya untuk kebijakan diskresioner mendapatkan hasil yang tidak signifikan dan negatif terhadap inflasi, berarti diskresioner belum mampu menurunkan inflasi. Di Indonesia kebijakan diskresioner dapat membahayakan kestabilan target inflasi, hal ini dikarenakan kebijakan diskresioner membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan kehati-hatian dalam mempertimbangkan kondisi perekonomian suatu negara, apabila pemerintah salah langkah mengambil keputusan saat membuat kebijakan maka akan berakibat memperburuk kondisi perekonomian dan akan memperburuk kestabilan inflasi. Dalam beberapa tahun krisis inflasi yang terjadi membuat pemerintah terpaksa mengeluarkan kebijakan diskresioner untuk menaikkan subsidi dan menurunkan pajak, hal ini bukannya menurunkan inflasi, tetapi akan memperparah kenaikan inflasi karena akan menimbulkan kenaikan yang tinggi pada defisit anggaran.

Terakhir, hasil menunjukkan untuk *openness* signifikan dan positif terhadap inflasi, artinya kenaikan *openness* mampu menaikkan inflasi sehingga mengakibatkan

terancamnya produsen dalam negeri. Beberapa produsen yang tidak mampu bersaing akan mengalami kerugian karena kenaikan biaya produksi yang tinggi, bukan hanya produsen yang terancam rugi, tetapi perekonomian juga akan lesu karena banyaknya tenaga kerja yang diberhentikan sehingga pengangguran meningkat. Oleh karena itu produk impor luar negeri yang menulari inflasi harus dicarikan substitusi untuk memperkuat industri dalam negeri sehingga tidak bergantung pada barang impor.

C. Saran

Atas dasar implikasi dari hasil pembahasan di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut :

1. Kredibilitas kebijakan aturan defisit harus memperhatikan komitmen dan konsistensi pemerintah dalam melaksanakannya. Serta memperbaiki sistem politik untuk meminimalisir defisit anggaran yang berlebihan karena penyalahgunaan anggaran.
2. Memperkuat koordinasi antara kebijakan moneter dari bank sentral dengan kebijakan fiskal untuk mencapai inflasi yang direncanakan.
3. Pemerintah harus lebih berhati-hati ketika akan mengambil kebijakan diskresi dengan menyesuaikan kebijakan yang tepat untuk stabilisasi pengendalian inflasi yang tak terduga.
4. Pemerintah mengamankan produk-produk yang potensial mendorong terjadinya inflasi, artinya produk impor luar negeri yang menulari inflasi harus dicarikan substitusi untuk memperkuat industri dalam negeri sehingga tidak terlalu bergantung pada barang impor.

5. Pemerintah harus memperhatikan kondisi inflasi yang ada di dalam negeri apakah inflasi sedang tidak stabil atau sebaliknya, serta melihat kondisi perekonomian dalam negeri ketika akan melakukan ekspor dan impor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggita dan Andie Megantara. *Era Baru Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Jakarta : Buku Kompas, 2009.
- Begg, David. *Economics Seventh Edition*. New York : McGraw-Hill. 2003.
- Boediono. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta : BPFE, 2010.
- Damodar Gujarati. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga. 1987.
- Deliarinov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.
- Dornbusch, Rudiger & Stanley, Fischer. *Ekonomi Makro*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994.
- Doddy, Moch Ariefianto. *Ekonometrika : esensi dan aplikasi dengan menggunakan Eviews*. Jakarta : Erlangga, 2012.
- FE UNJ. *Pedoman Skripsi 2012*. Jakarta: FE UNJ, 2012.
- G. Kopits dan S. Symansky. *Fiscal Policy Rules (Issue 162 of Occasional Papers)*. International Monetary Fund. 1998.
- Jafari, Ahmad DKK. *Openness and Inflation : New Empirical Panel Data Evidence*. Economics Letters ISSN 573-577, 2011.
- J.Baumol William & S.Blinder Alan. *Economics Principles and Policy*. United States of Amerika : Harcourt Brace Jovanovich,inc.1988.
- Kompas. *Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2004.
- Kuncoro, Haryo. *Does the Credible Fiscal Policy Support the Prices Stabilization*. Jakarta: Review of Economic Perspective ISSN 1213-2446, 2015.
- Kuncoro, Haryo. *Does The Credible Fiscal Policy Reduce Its Volatility? The Case Of Indonesia*. Journal of Applied Economic Sciences, Volume IX Issue 3(29), 2014.
- Lipsey, Richard, et al. *Pengantar Makroekonomi*. Jakarta : Erlangga, 1991.
- Lembaga Penelitian Ekonomi IBII. *Makro Ekonomi Indonesia*. Jakarta : IBII, 2008.
- Mankiw, Greogory. *Teori Makroekonomi*. Jakarta : Erlangga, 2000.
- Nieman, Stefan dkk. *Public Debt, Discretionary policy, and Inflation Persistence*. United Kingdom: Journal of Economic Dynamics and Control ISSN 1097-1109, 2011.

- Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Richard. Paul. Douglas. *Pengantar Makroekonomi*. Jakarta : Binarupa Aksara, 1995.
- Rother, Philipp. *Fiscal Policy and Inflation Volatility*. European Central Bank ISSN 1561-0810, 2004
- Samuelson, Paul & William D. *Economics*. New York : Mcraw-Hill, 2001.
- Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Suparmoko. *Pengantar Ekonomi Makro*. Yogyakarta : BPFE, 1996.
- Surjaningsih, Ndari DKK. *Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Output dan Inflasi*. Jakarta : Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan ISSN 1410-8046, 2012.
- Umi, Emi & Danang Suntoyo. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta : CAPS, 2012.
- Tang, Hsiao Chink, Philip Liu, dan Eddie C. Cheung. *Changing Impact of Fiscal Policy on Selected ASEAN Countries*. Philippines: ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration. 2010.
- Von, Jurgen Hagen & Guntram. *What doo deficits tell us about debt? Empirical evidence on creative accounting with fiscal rules in the EU*. Germany : Journal of Banking and Finance ISSN 3259-3279, 2006.
- Wijaya, Faried. *Pengantar Ekonomika Makro*. Yogyakarta : BPFE, 1990.
- Yanuar. *Ekonomi Makro Suatu Analisis Untuk Konteks Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. Jakarta : Yayasan Mpu Ajar Artha, 2009.
- Yiheiyis, Zelealem. *Trade Openness and Inflation Performance : A Panel Data Analysis in the context of Afrika Countries*. African : Journal of African Development Reviews Vol 25 No 1, 2013.
- Zakaria, Muhammad. *Openness and Inflation : Evidence From time Series Data*. Pakistan : Journal of Pakistan institute of development economics, 2010.

Lampiran 1 : Statistik Deskriptif Eviews 8

	Y	Z1	Z2AR	Z3	Z4
Mean	0.018806	0.004122	1.000118	1.96E-06	0.549155
Median	0.015800	0.004100	0.999400	0.054200	0.548200
Maximum	0.099700	0.041000	1.044900	0.309900	0.781000
Minimum	0.001600	-0.072300	0.931500	-0.573000	0.437500
Std. Dev.	0.016001	0.015752	0.020867	0.228436	0.067421
Skewness	2.648596	-1.993809	-0.193639	-1.046265	0.661136
Kurtosis	13.82211	12.72973	4.251928	3.440701	4.118211
Jarque-Bera	308.5038	234.9587	3.649280	9.717410	6.372451
Probability	0.000000	0.000000	0.161276	0.007761	0.041328
Sum	0.959100	0.210200	51.00600	0.000100	28.00690
Sum Sq. Dev.	0.012801	0.012406	0.021771	2.609140	0.227282
Observations	51	51	51	51	51

Lampiran 2.: Data Inflasi

BULAN	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jan	0.33	1.99	0.8	0.57	1.43	1.36	1.04	1.77	-0.07	0.84	0.89	0.76	1.03
Feb	0.87	1.5	0.2	-0.02	-0.17	0.58	0.62	0.65	0.21	0.3	0.13	0.05	0.75
Mar	0.89	-0.02	-0.23	0.36	1.91	0.03	0.24	0.95	0.22	-0.14	-0.32	0.07	0.63
Apr	0.46	-0.24	0.15	0.97	0.34	0.05	-0.16	0.57	-0.31	0.15	-0.31	0.21	-0.1
Mei	1.13	0.8	0.21	0.88	0.21	0.37	0.1	1.41	0.04	0.29	0.12	0.07	-0.03
Jun	1.67	0.36	0.09	0.48	0.5	0.45	0.23	2.46	0.11	0.97	0.55	0.62	1.03
Jul	2.12	0.82	0.03	0.39	0.78	0.45	0.72	1.37	0.45	1.57	0.67	0.7	3.29
Agt	-0.21	0.29	0.84	0.09	0.55	0.33	0.75	0.51	0.56	0.76	0.93	0.95	1.12
Sep	0.64	0.53	0.36	0.02	0.69	0.38	0.8	0.97	1.05	0.44	0.27	0.01	-0.35
Okt	0.68	0.54	0.55	0.56	8.7	0.86	0.79	0.45	0.19	0.06	-0.12	0.16	0.09
Nov	1.71	1.85	1.01	0.89	1.31	0.34	0.18	0.12	-0.03	0.6	0.34	0.07	0.12
Des	1.62	1.2	0.94	1.04	-0.04	1.21	1.1	-0.04	0.33	0.92	0.57	0.54	0.55
Tahunan	12.55	10.03	5.06	6.4	17.11	6.6	6.59	11.06	2.78	6.96	3.79	4.3	8.38

Lampiran 3 : Perencanaan dan Realisasi APBN Tahun 2001-2013 (Milyar Rp)

Tahun	Bugdet APBN (Surplus/Defisit)	Realisasi APBN (Surplus/Defisit)
2001	-54.727	-40.485
2002	-40.454	-23.652
2003	-34.436	-35.109
2004	10.536	-23.810
2005	-24.344	-14.408
2006	-39.984	-29.142
2007	-58.285	-49.844
2008	-34.503	-4.121
2009	-129.845	-88.619
2010	-133.748	-46.846
2011	-150.837	-84.400
2012	-190.105	-153.301
2013	-224.186	-211.937

Lampiran 4 : Total Utang Pemerintah tahun 2001-2013

Tahun	Utang Pemerintah (dalam Triliun Rupiah)
2001	1,273,18
2002	1,225,15
2003	1,232,04
2004	1,299,50
2005	1,313,29
2006	1,302,16
2007	1,389,41
2008	1,636,74
2009	1,590,66
2010	1,681,66
2011	1,808,95
2012	1,977,71
2013	2,354,54

Lampiran 5 : Data Ekspor

Th	Qt	Nilai / Value (US \$)	Th	Qt	Nilai / Value (US \$)
2001	1	\$14,866,905,514	2008	1	\$33,746,007,788
	2	\$14,482,973,624		2	\$36,650,370,180
	3	\$14,339,642,563		3	\$37,271,925,683
	4	\$12,631,383,203		4	\$29,352,120,751
2002	1	\$12,839,588,910	2009	1	\$23,029,154,790
	2	\$14,621,378,391		2	\$27,044,210,187
	3	\$15,071,609,389		3	\$30,070,495,453
	4	\$14,626,194,926		4	\$36,366,165,651
2003	1	\$15,140,177,753	2010	1	\$35,536,683,440
	2	\$15,312,936,274		2	\$36,984,487,367
	3	\$15,351,566,507		3	\$38,395,123,165
	4	\$15,253,566,461		4	\$46,862,809,498
2004	1	\$15,037,641,830	2011	1	\$45,387,481,321
	2	\$16,797,037,776		2	\$53,228,531,995
	3	\$19,599,213,412		3	\$53,609,705,959
	4	\$20,150,715,778		4	\$51,270,900,785
2005	1	\$19,878,585,740	2012	1	\$48,517,031,999
	2	\$20,870,057,398		2	\$48,444,194,466
	3	\$21,950,716,883		3	\$46,035,718,401
	4	\$22,960,592,594		4	\$47,034,900,378
2006	1	\$22,452,046,422	2013	1	\$45,415,693,320
	2	\$24,465,102,990		2	\$45,653,069,474
	3	\$26,635,940,179		3	\$42,878,345,684
	4	\$27,245,534,689		4	\$48,604,686,223
2007	1	\$25,581,853,424			
	2	\$28,278,049,679			
	3	\$29,150,985,677			
	4	\$31,090,001,971			

Lampiran 6 : Data Impor

Th	Qt	Nilai / Value (US \$)	Th	Qt	Nilai / Value (US \$)
2001	1	\$9,212,784,894	2008	1	\$29,727,571,165
	2	\$8,532,107,040		2	\$35,421,439,628
	3	\$6,935,433,858		3	\$36,492,102,634
	4	\$6,281,815,279		4	\$27,556,192,797
2002	1	\$6,632,909,022	2009	1	\$19,093,741,739
	2	\$7,319,940,030		2	\$22,283,523,429
	3	\$8,330,196,554		3	\$26,907,247,894
	4	\$9,005,807,488		4	\$28,544,731,919
2003	1	\$8,375,280,089	2010	1	\$29,961,239,745
	2	\$7,644,539,877		2	\$32,976,139,624
	3	\$8,045,748,839		3	\$34,451,614,166
	4	\$8,485,115,481		4	\$38,274,290,513
2004	1	\$10,202,026,754.0	2011	1	\$38,794,794,919
	2	\$10,760,865,965.0		2	\$44,786,152,792
	3	\$12,537,021,597.0		3	\$46,451,761,651
	4	\$13,024,617,042.0		4	\$47,402,846,374
2005	1	\$13,580,161,368	2012	1	\$45,747,066,367
	2	\$14,883,182,565		2	\$50,702,132,804
	3	\$15,393,824,097		3	\$45,516,883,562
	4	\$13,843,714,586		4	\$49,724,918,376
2006	1	\$13,327,012,270	2013	1	\$45,650,597,198
	2	\$15,601,799,653		2	\$48,760,048,099
	3	\$16,776,231,112		3	\$45,938,812,446
	4	\$15,360,422,501		4	\$46,279,212,137
2007	1	\$15,593,248,577			
	2	\$18,113,828,825			
	3	\$20,068,413,869			
	4	\$20,697,938,847			

Lampiran 7 : Hasil Estimasi Analisis Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 01/27/16 Time: 22:25

Sample (adjusted): 2001Q2 2013Q4

Included observations: 51 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.293878	0.108465	2.709430	0.0094
Z1	-0.240610	0.131260	-1.833071	0.0733
Z2AR	-0.314743	0.102827	-3.060898	0.0037
Z3	-0.004644	0.008733	-0.531795	0.5974
Z4	0.074306	0.030455	2.439839	0.0186
R-squared	0.316741	Mean dependent var		0.018912
Adjusted R-squared	0.257327	S.D. dependent var		0.016125
S.E. of regression	0.013897	Akaike info criterion		-5.621443
Sum squared resid	0.008883	Schwarz criterion		-5.432048
Log likelihood	148.3468	Hannan-Quinn criter.		-5.549069
F-statistic	5.331099	Durbin-Watson stat		1.966996
Prob(F-statistic)	0.001299			

Lampiran 8: Hasil Estimasi Analisis Regresi Linier Berganda dengan Variabel

Dummy *Inflation Targeting* 2005

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 01/27/16 Time: 22:25

Sample (adjusted): 2001Q2 2013Q4

Included observations: 51 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.253841	0.112879	2.248785	0.0295
Z1	-0.272379	0.133216	-2.044648	0.0468
Z2AR	-0.292504	0.103949	-2.813907	0.0072
Z3	-0.005940	0.008755	-0.678542	0.5009
Z4	0.099446	0.036741	2.706694	0.0096
D2005	0.006180	0.005107	1.210074	0.2326
R-squared	0.338273	Mean dependent var		0.018912
Adjusted R-squared	0.264748	S.D. dependent var		0.016125
S.E. of regression	0.013827	Akaike info criterion		-5.614248
Sum squared resid	0.008603	Schwarz criterion		-5.386975
Log likelihood	149.1633	Hannan-Quinn criter.		-5.527400
F-statistic	4.600781	Durbin-Watson stat		2.078316
Prob(F-statistic)	0.001786			

Lampiran 9 : Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.320494	Prob. F(2,44)	0.7275
Obs*R-squared	0.732294	Prob. Chi-Square(2)	0.6934

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 01/27/16 Time: 22:25

Sample: 2001Q2 2013Q4

Included observations: 51

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.024891	0.118593	-0.209886	0.8347
Z1	0.021117	0.136406	0.154807	0.8777
Z2AR	0.024530	0.113034	0.217015	0.8292
Z3	0.000117	0.008879	0.013208	0.9895
Z4	0.000379	0.030931	0.012266	0.9903
RESID(-1)	0.009155	0.155520	0.058865	0.9533
RESID(-2)	-0.132145	0.166336	-0.794445	0.4312
R-squared	0.014359	Mean dependent var		1.43E-16
Adjusted R-squared	-0.120047	S.D. dependent var		0.013329
S.E. of regression	0.014107	Akaike info criterion		-5.557474
Sum squared resid	0.008756	Schwarz criterion		-5.292321
Log likelihood	148.7156	Hannan-Quinn criter.		-5.456151
F-statistic	0.106831	Durbin-Watson stat		2.034474
Prob(F-statistic)	0.995219			

Lampiran 10 : Uji Heterokedastisitas Metode Harvey

Heteroskedasticity Test: Harvey

F-statistic	0.673874	Prob. F(4,46)	0.6135
Obs*R-squared	2.823060	Prob. Chi-Square(4)	0.5879
Scaled explained SS	2.580482	Prob. Chi-Square(4)	0.6303

Test Equation:

Dependent Variable: LRESID2

Method: Least Squares

Date: 01/27/16 Time: 22:25

Sample: 2001Q2 2013Q4

Included observations: 51

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.72986	16.96462	0.809323	0.4225
Z1	-2.406615	20.53001	-0.117224	0.9072
Z2AR	-24.32878	16.08282	-1.512719	0.1372
Z3	-0.277244	1.365829	-0.202986	0.8400
Z4	0.577273	4.763402	0.121189	0.9041

R-squared	0.055354	Mean dependent var	-10.29469
Adjusted R-squared	-0.026789	S.D. dependent var	2.144990
S.E. of regression	2.173531	Akaike info criterion	4.483478
Sum squared resid	217.3150	Schwarz criterion	4.672872
Log likelihood	-109.3287	Hannan-Quinn criter.	4.555851
F-statistic	0.673874	Durbin-Watson stat	2.207522
Prob(F-statistic)	0.613500		

Lampiran 11 : Pengolahan Data

Th/Qt	INFASI/100	Z1	Z2AR	Z3	Openness
2001Q1	0.0209	0.0957	-	-	0.7780
2001Q2	0.0326	0.0352	0.9722	0.1029	0.7810
2001Q3	0.0255	-0.0181	1.0252	0.0542	0.6305
2001Q4	0.0401	-0.0723	1.0242	-0.0896	0.6097
2002Q1	0.0347	0.0069	1.0011	-0.1073	0.6084
2002Q2	0.0092	0.0086	1.0016	0.0195	0.5821
2002Q3	0.0154	0.0099	0.9981	0.1234	0.5822
2002Q4	0.0359	0.0119	0.9940	-0.0835	0.5915
2003Q1	0.0077	0.0131	0.9874	-0.1367	0.5517
2003Q2	0.0045	0.0041	1.0384	0.1067	0.5341
2003Q3	0.0123	-0.0047	1.0136	0.1238	0.5187
2003Q4	0.025	-0.0137	1.0078	-0.0527	0.5408
2004Q1	0.0091	-0.0012	0.9986	-0.1425	0.5497
2004Q2	0.0233	0.0005	1.0029	0.0810	0.5708
2004Q3	0.005	0.0020	1.0052	-0.0411	0.6233
2004Q4	0.0249	0.0036	1.0087	0.0455	0.6402
2005Q1	0.0317	-0.0016	0.9823	-0.2726	0.6283
2005Q2	0.0105	0.0037	0.9779	0.0671	0.6297
2005Q3	0.0202	0.0083	0.9797	0.2183	0.6669
2005Q4	0.0997	0.0123	0.9315	0.1375	0.6331
2006Q1	0.0197	0.0059	0.9938	-0.3682	0.5521
2006Q2	0.0087	0.0046	0.9870	0.2198	0.5715
2006Q3	0.0116	0.0033	0.9723	0.0535	0.5708
2006Q4	0.0241	0.0023	0.9796	0.0672	0.5707
2007Q1	0.019	0.0040	1.0006	-0.3264	0.5240
2007Q2	0.0017	0.0031	1.0119	0.2109	0.5438
2007Q3	0.0227	0.0022	1.0007	0.0010	0.5482
2007Q4	0.0207	0.0016	0.9994	0.0393	0.5741
2008Q1	0.0337	-0.0067	1.0030	-0.2785	0.5904
2008Q2	0.0444	0.0104	0.9794	0.3099	0.6136
2008Q3	0.0285	0.0247	0.9967	0.0358	0.5826
2008Q4	0.0053	0.0410	1.0345	-0.0074	0.5582
2009Q1	0.0036	0.0221	0.9955	-0.2968	0.4375
2009Q2	0.0016	0.0119	0.9723	0.2897	0.4388
2009Q3	0.0206	0.0026	0.9799	-0.0163	0.4558
2009Q4	0.0049	-0.0061	0.9759	0.1324	0.4858
2010Q1	0.0082	0.0030	0.9980	-0.5730	0.4601
2010Q2	0.0141	0.0099	0.9873	0.2969	0.4595

Th/Qt	INFASI/100	Z1	Z2AR	Z3	Openness
2010Q3	0.0277	0.0162	0.9968	0.1000	0.4568
2010Q4	0.0158	0.0228	0.9923	0.1780	0.5205
2011Q1	0.007	0.0137	0.9945	-0.5711	0.4844
2011Q2	0.0036	0.0104	1.0056	0.2277	0.5219
2011Q3	0.0187	0.0072	0.9921	0.1783	0.5111
2011Q4	0.0079	0.0047	1.0061	0.1051	0.5319
2012Q1	0.0088	0.0105	1.0097	-0.5274	0.4957
2012Q2	0.009	0.0060	1.0124	0.2961	0.5109
2012Q3	0.0166	0.0018	1.0207	-0.0491	0.4709
2012Q4	0.0077	-0.0023	1.0196	0.1471	0.5256
2013Q1	0.0241	0.0097	1.0416	-0.5103	0.4780
2013Q2	0.009	-0.0022	1.0449	0.2567	0.4866
2013Q3	0.0406	-0.0129	1.0122	0.1223	0.4632
2013Q4	0.0076	-0.0237	1.0393	0.1030	0.5392

RIWAYAT HIDUP



Nella Damayanti Hutaeruk, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 27 April 1995. Penulis merupakan putri dari pasangan Ronald Hutaeruk dan Mawarti B Noto, penulis juga merupakan anak kedua dari dua bersaudara, bertempat tinggal di Jl. Pulomacan V No.7 Rt 15/Rw 005 Tomang, Jakarta Barat.

Riwayat Pendidikan : Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak Baptis Cengkareng indah Jakarta, kemudian melanjutkan ke bangku Sekolah Dasar Negeri 08 Tomang Jakarta dari tahun 2000 sampai dengan 2006. Selanjutnya meneruskan ke pendidikan dibangku Sekolah Menengah Pertama Negeri 286 Jakarta dari tahun 2006 sampai dengan 2009. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan dibangku Sekolah Menengah Atas Negeri 23 Jakarta dari tahun 2009 sampai dengan 2012. Pada tahun 2012, penulis diterima di Universitas Negeri Jakarta melalui jalur undangan dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi pada Program Studi Pendidikan Ekonomi.

Pengalaman Organisasi : Penulis bergabung dalam organisasi kampus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi dan Administrasi pada bagian staff dana dan usaha tahun 2012, **Pengalaman Kerja :** Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Koperasi Pegawai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Praktek Kegiatan Mengajar (PKM) di SMAN 53 Jakarta Timur. **Prestasi:** Presenter Seminar dan Konferensi Nasional (SKN) di Universitas Negeri Jakarta Tahun 2015, Asisten Research dengan judul “Dampak Kredibilitas Kebijakan Fiskal pada Stabilitas Ekonomi Makro” tahun 2015 dan Penulis melakukan penelitian dengan judul “Dampak Kredibilitas Kebijakan Fiskal terhadap Inflasi di Indonesia” untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2016.